



Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

20
22

LAPORAN KINERJA

OT.04 /LKJ-005/PW21/1/2023
5 Januari 2023

📍 Jalan Tamalanrea Raya
No. 3 Makassar 90245
☎️ (0411) 590591, 590592,
Fax: (0411) 590595
🌐 sulsel@bpkp.go.id

KATA PENGANTAR



Prinsip manajemen berbasis kinerja mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kerjanya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mencakup penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan di Provinsi Sulawesi Selatan baik

berupa *assurance* maupun *consulting* dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas-tugas dukungan pengawasan.

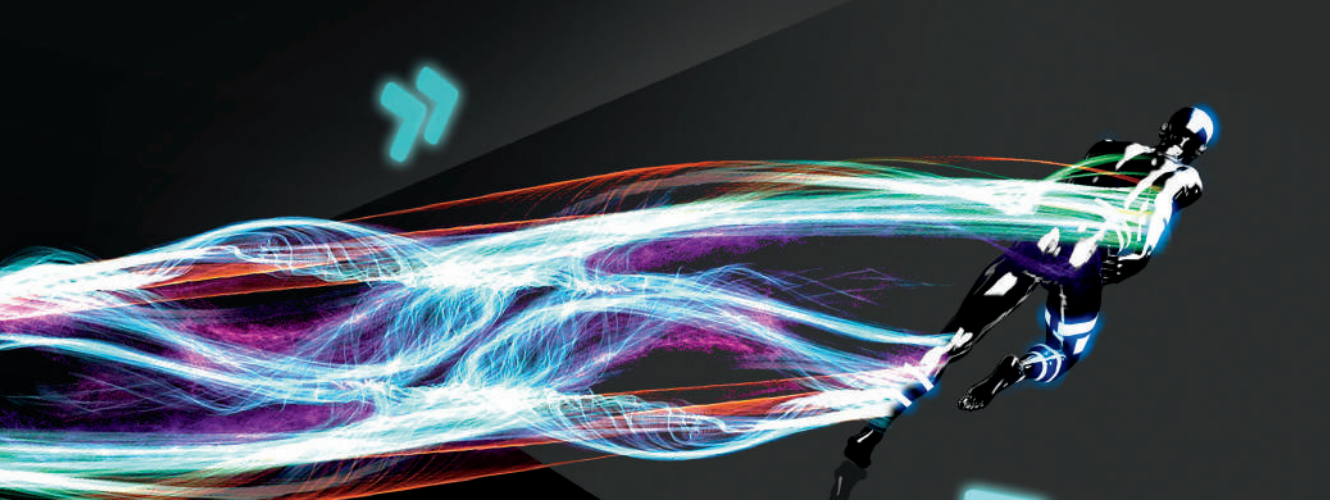
Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020-2024. Dalam perjanjian kinerja tahun 2022 terdapat enam sasaran kegiatan yang dijabarkan ke dalam 37 (tiga puluh tujuh) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran menunjukkan 29 (dua puluh sembilan) indikator mencapai/melampaui target, tiga indikator belum mencapai target dan lima indikator tidak ada penetapan target dari pusat.

Realisasi kinerja tahun 2022 berdasarkan sasaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsi utama sebagai Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi upaya perbaikan kinerja dan peningkatan serta penguatan peran BPKP di Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, 5 Januari 2023
Kepala Perwakilan,

Rizal Sutaili
NIP. 19670924 198803 1 001





Ringkasan Eksekutif

Dari 37 indikator kinerja, 29 telah mencapai/melampaui target, tiga tidak mencapai target, dan lima tidak ditetapkan target dari pusat, yang terdiri dari :

1. Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	227,76%	19. Jumlah Pemerintah Daerah menindaklanjuti <i>Area Of Improvement</i> dari hasil pengukuran EPK.	300%
2. Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah.	103,04%	20. Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas \geq Level 3.	0%
3. Nilai penyelamatan keuangan Negara dan daerah.	4.606,99%	21. Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas \geq Level 3.	107,69%
4. Jumlah proyek strategis nasional yang tercapai sesuai target.	200%	22. Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3.	100%
5. Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan.	117,65%	23. Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3.	106,25%
6. Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi.	100%	24. Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	100%
7. Persentase rekomendasi startegis yang ditindaklanjuti	91,46%	25. Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3.	166,67%
8. Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik.	100%	26. Jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.	0%
9. Jumlah BUMD dengan kinerja sehat.	120%	27. Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel.	400%
10. Jumlah BLUD dengan kinerja sehat.	100%	28. Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai.	100%
11. Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan.	100%	29. Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	0%
12. Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa.	250%	30. Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	83,33%
13. Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik.	0%	31. Nilai skor zona integritas unit kerja.	101,73%
14. Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	0%	32. Nilai SAKIP unit kerja.	103,54%
15. Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3.	300%	33. Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) pada tahun 2022.	136,99%
16. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti.	100%	34. Persentase Penyelesaian RTP (MR Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan).	100%
17. Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti.	125%	35. Indeks kualitas layanan eksternal unit kerja.	124,20%
18. Jumlah pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik.	0%	36. Skor IKPA unit kerja.	101,35%
		37. Nilai pengelolaan BMN Unit Kerja.	121,28%

Maturitas SPIP

No	Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	Ket.
1	Provinsi Sulawesi Selatan	3,103	3	Validasi Perwakilan
2	Kota Parepare	3,353	3	Menunggu SP
3	Kota Makassar	3,281	3	Validasi Perwakilan
4	Kabupaten Sinjai	3,270	3	Menunggu SP
5	Kabupaten Maros	3,260	3	Validasi Perwakilan
6	Kabupaten Luwu	3,226	3	Validasi Perwakilan
7	Kabupaten Luwu Utara	3,222	3	Validasi Perwakilan
8	Kabupaten Bantaeng	3,217	3	Validasi Perwakilan
9	Kabupaten Sidrap	3,188	3	Validasi Perwakilan
10	Kabupaten Pinrang	3,187	3	Validasi Perwakilan
11	Kota Palopo	3,138	3	Validasi Perwakilan
12	Kabupaten Gowa	3,109	3	Validasi Perwakilan
13	Kabupaten Soppeng	3,100	3	Evaluasi Perwakilan
14	Kabupaten Bone	3,086	3	Validasi Perwakilan
15	Kabupaten Luwu Timur	3,031	3	Validasi Perwakilan
16	Kabupaten Bulukumba	3,025	3	Validasi Perwakilan
17	Kabupaten Kep. Selayar	3,002	3	Validasi Perwakilan
18	Kabupaten Wajo	3,001	3	Validasi Perwakilan

Dari 25 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, terdapat 18 (delapan belas) pemerintah daerah yang mencapai Level 3 dan tujuh pemerintah daerah mencapai Level 2.

Kapabilitas APIP

Dari 25 Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota terdapat 14 (empat belas) inspektorat yang sudah mencapai Level 3, sembilan inspektorat mencapai Level 2, dan dua inspektorat berada pada Level 1.

No	Nama Inspektorat (APIP)	Level Kapabilitas	Status
1	Inspektorat Kota Palopo	3	Reviu Pusat
2	Inspektorat Kabupaten Bantaeng	3	Reviu Pusat
3	Inspektorat Kabupaten Gowa	3	Reviu Pusat
4	Inspektorat Kabupaten Maros	3	Reviu Pusat
5	Inspektorat Kabupaten Wajo	3	Reviu Pusat
6	Inspektorat Kota Parepare	3	Reviu Pusat
7	Inspektorat Kabupaten Bone	3	Reviu Pusat
8	Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	3	Reviu Pusat
9	Inspektorat Kabupaten Luwu Utara	3	Reviu Pusat
10	Inspektorat Kabupaten Pinrang	3	Reviu Pusat
11	Inspektorat Kabupaten Sidrap	3	Reviu Pusat
12	Inspektorat Kota Makassar	3	Reviu Pusat
13	Inspektorat Kabupaten Enrekang	3	Reviu Pusat
14	Inspektorat Kabupaten Sinjai	3	Reviu Pusat
Jumlah level 3 IA-CM		14	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas dan Fungsi	1
B. Struktur Organisasi	3
C. Aspek Strategis Organisasi	4
D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi	8
E. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Target Kinerja 2020-2024	11
1. Pernyataan Visi	11
2. Pernyataan Misi	11
3. Tujuan	11
4. Sasaran Strategis	12
5. Program dan Sasaran Program	16
6. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	16
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Tahun 2021	22
1. Ringkasan Kinerja	22
2. Uraian Kinerja	24
B. Kinerja Lainnya Tahun 2022	66
1. Kinerja Lain	66
2. Penghargaan/Apresiasi Instansi Lain	70
3. Perbaikan SAKIP Tahun 2022	70
C. Akuntabilitas Keuangan	70
BAB IV PENUTUP	72
A. Capaian dan Analisis Kinerja Organisasi	72
B. Upaya dalam Rangka Peningkatan Kinerja	75
LAMPIRAN	78

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarah dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern.



Fungsi Pertama:

- a) Fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden;
- b) Fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

Fungsi Kedua:

- a) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
- b) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;

- c) pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
- d) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi;
- e) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
- f) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perpanjangan tangan dari BPKP memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
- c. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
- e. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



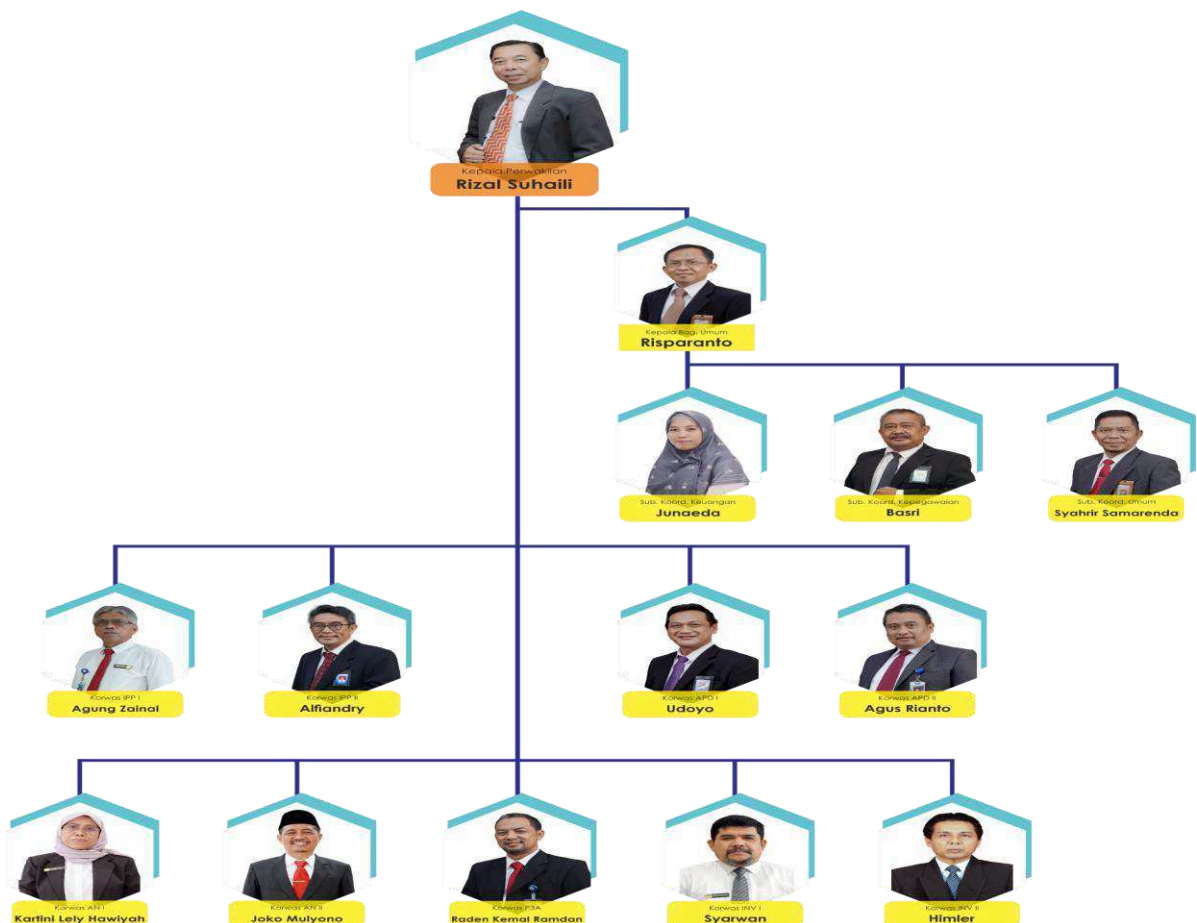
Dalam melaksanakan tugas di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan 13 (tiga belas) fungsi yang menekankan pada efektivitas dan efisiensi sebagai dasar pencapaian tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melalui proses internal kegiatan pengawasan yang berbasis risiko, terbangunnya pola kemitraan yang efektif dengan *stakeholders*, serta terpenuhinya kepatuhan terhadap kebijakan dan aturan.

Stakeholders Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari *stakeholders* internal, serta eksternal yaitu Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota), masyarakat (*beneficiaries*), pelaksana kebijakan (Pemda, Instansi Vertikal, BUMN/D, Universitas Negeri), komunitas profesi, BPK-RI Perwakilan, DPRD, dan para mitra kerja (Inspektorat, Polri, Kejaksaan, dan KPK).

Pada perspektif *stakeholders*, kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menghasilkan laporan/dokumen yang bermanfaat dan tepat waktu serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Pasal 6 Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, struktur organisasi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas:



- Kelompok Bagian Umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum dengan dibantu oleh 3 Sub. Koordinator;

- Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi pemerintah Pusat (IPP) yang dipimpin oleh dua orang Koordinator Pengawasan;
- Kelompok JFA Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) yang dipimpin oleh dua orang Koordinator Pengawasan;
- Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara (AN) yang dipimpin oleh dua orang Koordinator Pengawasan;
- Kelompok JFA Bidang Investigasi yang dipimpin oleh dua orang Koordinator Pengawasan;
- Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (P3A) yang dipimpin oleh satu orang Koordinator Pengawasan.

Tugas masing-masing bagian dan bidang kelompok JFA adalah sebagai berikut:

Bagian Umum bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program bagian tata usaha, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan penyusunan laporan bagian tata usaha dan laporan Program Pelatihan Mandiri (PPM) perwakilan.

Kelompok JFA Bidang IPP bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan pusat.

Kelompok JFA Bidang APD bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan daerah.

Kelompok JFA Bidang AN bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang keakuntannegaraan.

Kelompok JFA Bidang Investigasi bertugas melaksanakan kegiatan keinvestigasian.

Kelompok JFA Bidang P3A bertugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan pelaporan perwakilan serta kegiatan pembinaan APIP.

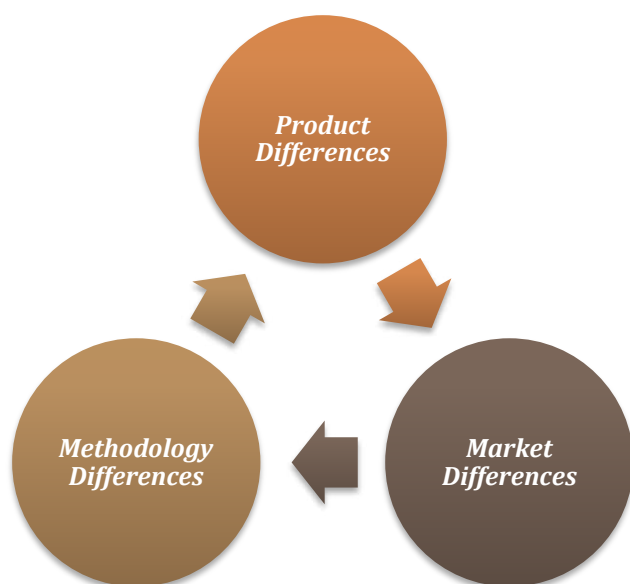
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1. Aspek Strategis Eksternal

BPKP sebagai Auditor Presiden memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh

instansi pemerintah. Peran pembina SPIP terkait erat dengan peran pengawasan intern, karena dengan penguatan SPIP maka pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan menjadi semakin terjaga dari penyimpangan dan penyalahgunaan dengan strategi penguatan BPKP mencakup:



Product Differences

Kekuatan BPKP tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas produk BPKP harus bersifat strategis, makro, nasional (lintas sektoral) yang merupakan jiwa pasal 49 PP Nomor 60 Tahun 2008. Tugas BPKP bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara oleh para pengguna anggaran agar tercapai tujuan akuntabilitas Presiden yang menjalankan amanah rakyat.

Market Differences

Agar produk BPKP menjadi bernilai, maka harus dikenali melalui *market*. BPKP memiliki pasar pengawasan yang jelas, yaitu Presiden sebagai *stakeholders* utama dan *stakeholders* birokrasi yang lain yang terdiri dari legislatif, yudikatif, organisasi pendidikan dan organisasi profesi. Banyak pihak yang sudah terbantu oleh kinerja BPKP dan membutuhkan BPKP.

Methodology Differences

Dengan *new* BPKP perlu terus dikembangkan metodologi pengawasan yang spesifik dan membawa manfaat misalnya program *evaluations*, *policy analysis*, *forensic audit*, *performance audit*, dan *internal control review*.

Dengan wilayah kerja sebanyak 25 (dua puluh lima) Pemerintah Daerah menjadikan tantangan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk mewujudkan strategi penguatan tersebut di atas.

2. Aspek Strategis Internal

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga aspek strategis internal yang berasal dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana.

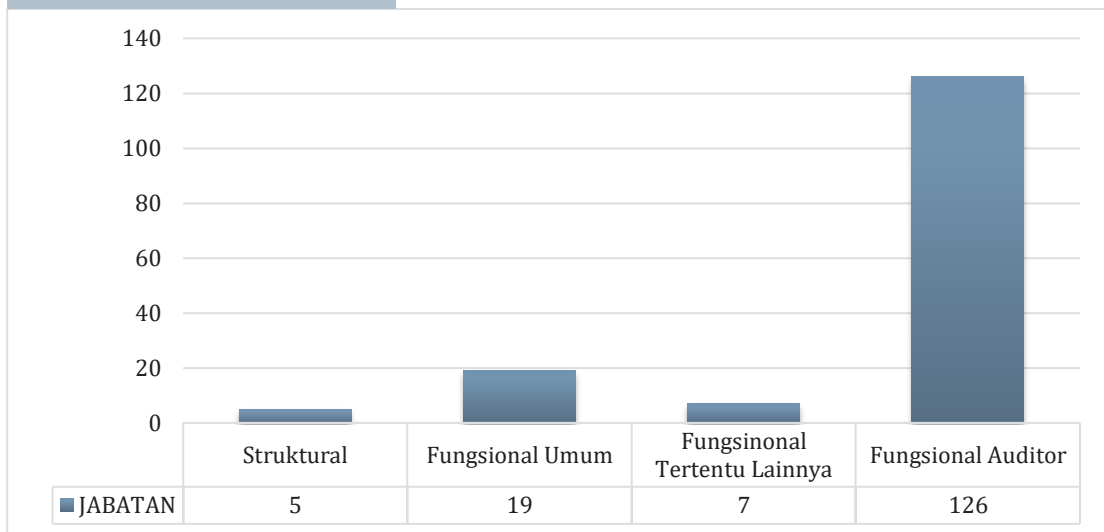
a. Sumber Daya Manusia

Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 15 Desember 2022 berjumlah 157 (seratus lima puluh tujuh) orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan sebagai berikut:

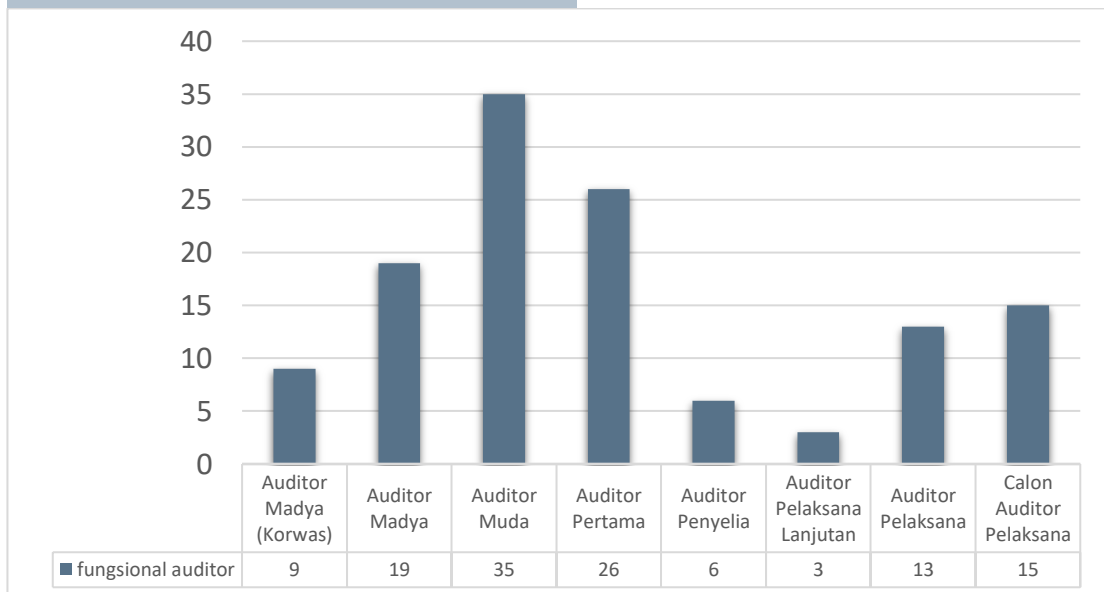
1) Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

Komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 15 Desember 2022 menurut jabatan tercermin sebagai berikut:

SDM Berdasarkan Jabatan

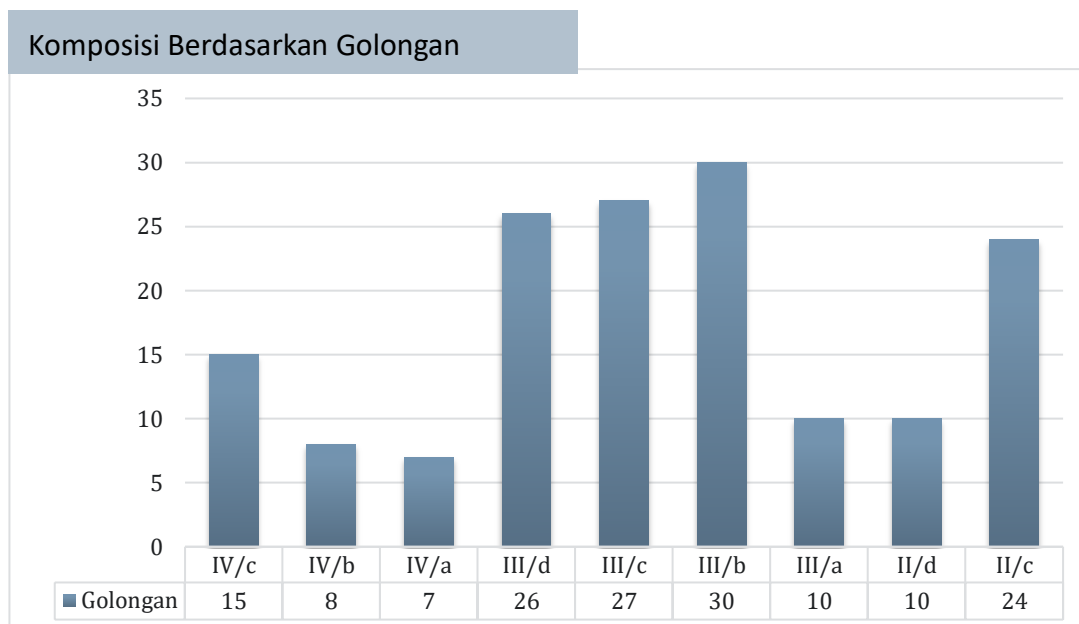


Komposisi Jabatan Fungsional Auditor



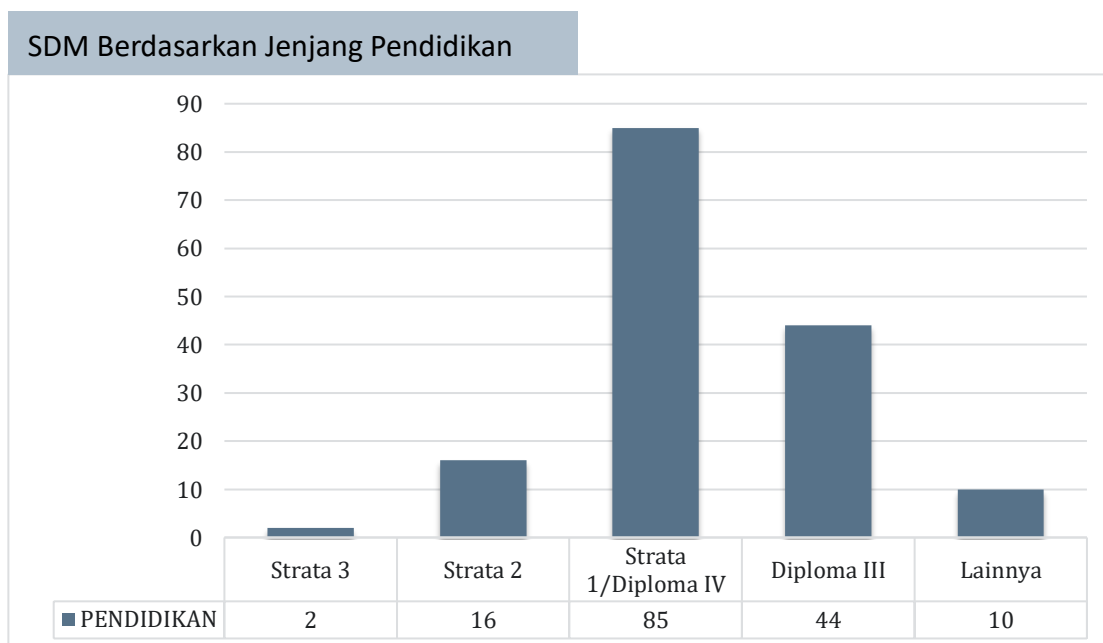
2) Komposisi Pegawai Menurut Golongan

Komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Oktober 2022 menurut golongan sebagaimana sebagai berikut:



3) Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Oktober 2022 menurut berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:



b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin (termasuk didalamnya kendaraan dinas), irigasi dan jaringan, sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Tanah	35.982	M
2	Bangunan	67	Unit
3	Peralatan dan Mesin	1.584	Unit
4	Irigasi	2	Unit
5	Jaringan	1	Unit
6	Mobil Operasional	10	Unit
7	Mobil Ambulance	1	Unit
8	Sepeda Motor	4	Unit

Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan sarana olah raga, ruang untuk poliklinik, perpustakaan, arsip, aula, dan sarana ibadah.

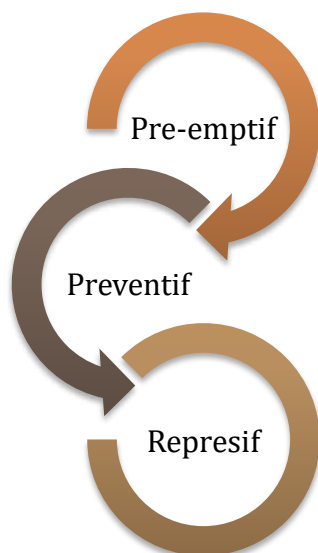
c. Sumber Dana

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2022 sebesar Rp37.516.229.000,00 yang bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Program	Jumlah
1	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan	7.086.330.000
2	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	30.429.899.000
Jumlah		37.516.229.000

D. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

BPKP melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan sebagai berikut:



● Pre-emptif

Kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan *good governance*, pelayanan publik, dan pemberantasan KKN. Sasaran kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit birokrasi yang bersifat laten.

● Preventif

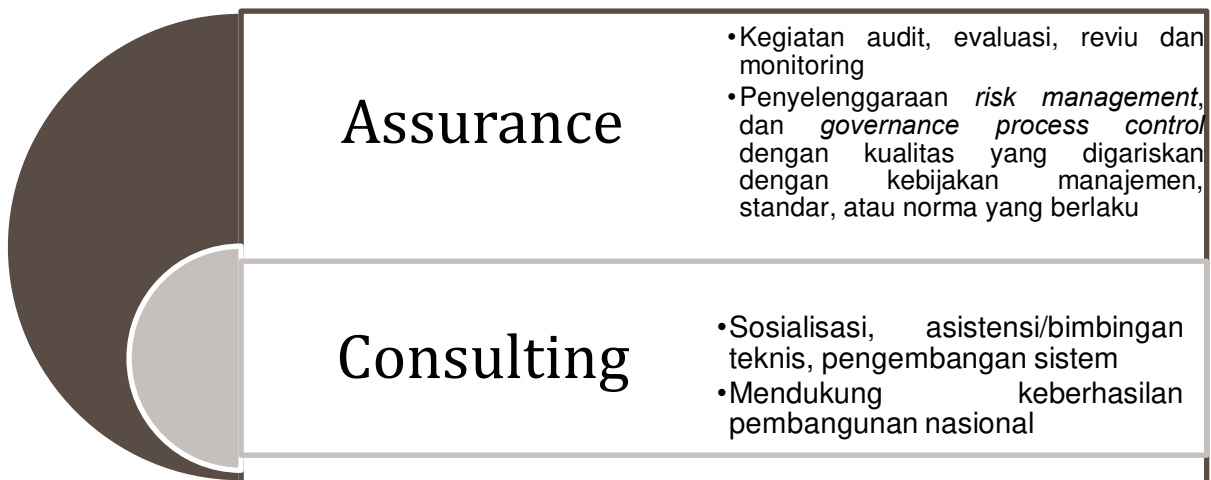
Kelompok kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk memecahkan permasalahan kesisteman yang memengaruhi penciptaan peringatan dini (*early warning system*) atas proses *governance*, manajemen risiko, dan pencegahan KKN, berdasarkan pola

kemitraan dengan unsur-unsur manajemen pemerintah. Sasarannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya *moral hazard* di birokrasi.

● Represif

Kelompok kegiatan represif berupa audit investigatif untuk menjustifikasi perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus-kasus dengan atau tidak diketemukannya indikasi melawan hukum/tindak pidana korupsi. Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya kasus penyimpangan dan perbuatan melawan hukum.

Tiga strategi tersebut kemudian diefektifkan pada dua peran yaitu:



Berdasarkan peran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan turut mengembangkan beberapa produk BPKP yang bermanfaat bagi manajemen perubahan. Selain produk untuk pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP 60 Tahun 2008, BPKP juga menghasilkan produk unggulan antara lain:

1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan;
2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA);
3. *Good Governance* di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat;
5. Sistem Informasi Akuntansi PDAM;
6. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik;
7. Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD;
8. Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO;
9. Program Implementasi Penerapan PPK BLU/BLUD;
10. Program Anti Korupsi (PAK);

11. *Fraud Control Plan* (FCP);
12. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP);
13. *Management Assessment Center* (MAC);
14. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (Simkeu-Desa);
15. Program Peningkatan Kapabilitas APIP;
16. Program Peningkatan Tingkat Kematangan SPIP;
17. Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP)
18. Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes)
19. Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas (Sibijak)
20. Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes)

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2022 yang diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perkin) 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut:



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. TARGET KINERJA 2020-2024

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern serta fungsi pengawasan intern. Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam visi, misi, dan tujuan BPKP dalam rangka mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan sesuai Visi dan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024.



1. Pernyataan Visi

Untuk melaksanakan amanah tersebut dan dengan mempertimbangkan capaian kegiatan pengawasan periode sebelumnya, potensi dan permasalahan, serta aspirasi masyarakat, maka untuk periode 2020-2024 BPKP mengusung visi berupa: “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

2. Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKP melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan mensinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan:

Misi I: Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan

Misi II: Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

3. Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Untuk menyelenggarakan dua misi

tersebut, maka ditetapkan tujuan untuk masing-masing misi tersebut, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2024 yaitu:

Tujuan Strategis I: Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional;

Tujuan Strategis II: Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Masing-masing tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam enam sasaran strategis dan 39 (tiga puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai gambaran target *outcome* yang akan dicapai. Penjabaran kedua Tujuan Strategis ke dalam Sasaran Strategis beserta indikator-indikatornya masing-masing adalah sebagai berikut:

Tujuan Strategis I: Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional

Tujuan ini dijabarkan menjadi lima Sasaran Strategis dan 36 (tiga puluh enam) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

a. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah.

Sesuai tugas, fungsi dan perannya, BPKP melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah. Untuk itu ditetapkan sasaran strategis pertama yaitu “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah”.

Sasaran tersebut merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020- 2024 yang mencerminkan anggaran negara dan daerah yang dikelola memiliki manfaat terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan bebas dari penyimpangan keuangan. Sasaran strategis ini diukur dengan enam indikator berupa:

- 1) Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi
- 2) Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi

- 3) Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah
- 4) Nilai Penyelamatan Keuangan Negara.
- 5) Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer
- 6) Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah

b. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional

Sesuai tugas, fungsi dan perannya, BPKP melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah. Untuk itu ditetapkan sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional”.

Sasaran tersebut merupakan kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan tingkat ketercapaian sasaran pembangunan, program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas strategis dan proyek strategis nasional melalui tugas pengawasan pembangunan. Sasaran Strategis ini diukur dengan tujuh indikator berupa:

- 1) Jumlah Proyek Prioritas (PP) yang Tercapai Sesuai Target;
- 2) Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang Diawasi;
- 3) Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang Tercapai Sesuai Target;
- 4) Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target;
- 5) Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target;
- 6) Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik;
- 7) Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan.

c. Sasaran Strategis III: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha

Berdasarkan tugas, fungsi dan perannya, BPKP melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran keuangan serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Untuk itu ditetapkan sasaran

strategis ketiga yaitu “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha”.

Sasaran tersebut merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020- 2024 yang mencerminkan tingkat kontribusi Badan Usaha Milik Negara/Daerah pada negara/daerah baik sebagai pelaksana tugas pembangunan maupun dalam upaya menambah ruang fiskal negara/daerah melalui pendampingan dan pengawasan BPKP. Sasaran Strategis ini diukur dengan lima indikator berupa:

- 1) Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik;
- 2) Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik;
- 3) Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat;
- 4) Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat;
- 5) Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan.

d. Sasaran Strategis IV: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Berdasarkan mandat tugas, fungsi dan perannya, BPKP melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Untuk itu, ditetapkan sasaran strategis keempat yaitu “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi”. Sasaran ini berkaitan dengan peran BPKP sebagai Pembina Penyelenggaraan SPIP, dimana salah satu tujuan pelaksanaan SPIP adalah memastikan tujuan organisasi tercapai dan salah satu risiko terbesar dalam pencapaian tujuan organisasi adalah risiko terjadinya penyimpangan dan korupsi.

Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan sejauh mana upaya dan keberhasilan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Sasaran Strategis ini diukur dengan empat indikator berupa:

- 1) Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti;

- 2) Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti;
- 3) Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik;
- 4) Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik.

e. Sasaran Strategis V: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU

Sesuai tugas, fungsi dan perannya, BPKP dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP, serta melakukan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor. Untuk itu ditetapkan sasaran strategis kelima yaitu “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU”.

Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan melalui pendampingan dan pengawasan BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan sejauh mana tingkat kematangan pelaksanaan pengendalian internal pemerintah dan tingkat kemampuan/kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, BUMN/D dan BLU/D. Sasaran Strategis ini diukur dengan 14 (empat belas) indikator berupa:

- 1) Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3;
- 2) Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3;
- 3) Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3;
- 4) Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3;
- 5) Persentase Jumlah Pemda yang Akuntabel Dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah;
- 6) Tersedianya Rekomendasi Strategis (*Policy Brief*) kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- 7) Persentase Jumlah Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
- 8) Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai;
- 9) Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes;
- 10) Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3;
- 11) Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3;
- 12) Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3;
- 13) Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3;

14) Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3.

Tujuan Strategis II: Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Sehat dan Akuntabel

Tujuan ini dijabarkan dalam Sasaran Strategis VI: Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas, sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi serta mampu mendukung BPKP dalam mencapai kinerjanya, maka perlu ditetapkan sasaran kinerja yang bersifat “enablers”, yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas dengan tiga Indikator Kinerja Utama.

Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan kemampuan sumber daya internal BPKP mendukung pencapaian visi, misi dan kinerja BPKP. Sasaran Strategis ini diukur dengan tiga indikator berupa:

- a. IA-CM (*Internal Audit Capability Models*) BPKP;
- b. Indeks kesehatan organisasi (IKO); dan
- c. Indikator Nilai Reformasi Birokrasi.

5. Program dan Sasaran Program

Tujuan dan Sasaran Strategis dijabarkan dalam Program dan Sasaran Program. Terdapat dua program yang dimiliki BPKP yaitu Program 01: Program Dukungan Manajemen Internal. Program ini merupakan penjabaran dari Tujuan Strategis Kedua dan Sasaran Strategis Keenam. Tanggung jawab program ini diberikan kepada Unit Kerja Kebiroan yaitu Biro MKOT, Biro SDM, Biro Keuangan, Biro Hukum dan Komunikasi dan Biro Hukum. Program kedua adalah Program 06: Program Pengawasan Pembangunan. Program ini merupakan penjabaran dari Tujuan Strategis Pertama dan lima Sasaran Strategisnya. Tanggung jawab program ini diberikan kepada Unit Kerja Kedeputian, Unit Kerja Perwakilan, Unit Kerja Inspektorat dan Unit Kerja Pusat-pusat.

6. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unit kerja eselon II BPKP dimana dalam menyusun target kinerja selalu mengacu kepada target kinerja BPKP 2020-2024. Penyusunan target kinerja dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sasaran program yang termuat dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020-2024 sebanyak 6 (enam) program dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 15 (lima belas) yaitu sebagai berikut: Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memberikan dukungan atas pencapaian Program 01 dan 06 melalui dukungan pencapaian 6 (enam) sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Sifat Target	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
I	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah							
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	158	530	758	758	758
1.2	Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	316	884	1.263	1.263	1.263
1.3	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	1.123	186.779	154.487	136.270	112.930
1.4	Nilai penyelamatan keuangan Negara	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	27.124	40.679	49.715	56.500	51.982
1.5	Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	-	118	120	122	125
1.6	Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	-	59	60	61	62
II.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional							
2.1	Jumlah PP yang tercapai sesuai target	Program Prioritas	Tidak Kumulatif	1	5	1	1	1
2.2	Jumlah KP yang diawasi	Kegiatan Prioritas	Tidak Kumulatif	9	7	7	7	7
2.3	Jumlah KP yang tercapai sesuai target	Kegiatan Prioritas	Tidak Kumulatif	13	13	13	13	14
2.4	Jumlah PPS yang tercapai sesuai target	Program	Tidak Kumulatif	4	3	3	3	3
2.5	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Program	Tidak Kumulatif	-	1	1	1	1
2.6	Jumlah Program Lintas Sektor Pembinaan Daerah yang Tercapai Sesuai Target	Program	Tidak Kumulatif	-	1	1	1	1
2.7	Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik	Persen	Tidak Kumulatif	-	16,67%	25%	29,17%	33%
2.8	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	Tidak Kumulatif	75%	80%	85%	85%	85%
III.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha							
3.1	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	Kumulatif	-	-	-	-	1
3.2	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	Kumulatif	-	-	-	2	3
3.3	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	Tidak Kumulatif	9	10	10	11	11
3.4	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	Tidak Kumulatif	-	4	4	4	4
3.5	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	Kumulatif	-	45	55	69	77

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Sifat Target	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
IV	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi							
4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	Tidak Kumulatif	100%	100%	100%	100%	100%
4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	Kumulatif	70%	75%	80%	85%	90%
4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	Tidak Kumulatif	-	-	2	3	4
4.4	Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	BUMD	Tidak Kumulatif	-	-	2	1	2
V	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU							
5.1	Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	APIP	Kumulatif	12	14	17	19	21
5.2	Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	K/L/ Pemda	Kumulatif	16	18	19	20	21
5.3	Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	K/L/ Pemda	Kumulatif	-	-	-	1	1
5.4	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Pemkab/ /Kota	Kumulatif	1	2	3	4	9
5.5	Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Persen	Kumulatif	0,00%	0,18%	0,37%	1,48%	2,40%
5.6	Tersedianya Rekomendasi Strategis (<i>Policy Brief</i>) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Reko- mendasi	Kumulatif	1	1	1	1	1
5.7	Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen	Kumulatif	35%	40,01%	45,02%	50,02%	54,98%
5.8	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara Memadai	Desa	Kumulatif	-	45	111	246	506
5.9	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	Kumulatif	1	5	8	10	12
5.10	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	Kumulatif	-	-	1	2	4
5.11	Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	Kumulatif	-	-	-	2	2
5.12	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	Kumulatif	-	3	6	8	11
5.13	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3	BUMD	Kumulatif	-	-	-	2	3
VI	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja							

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Sifat Target	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	Tidak Kumulatif	75	76	77	78	79
6.2	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	Persen	Tidak Kumulatif	100%	100%	100%	100%	100%
6.3	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	Persen	Tidak Kumulatif	100%	100%	100%	100%	100%
6.4	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	Persen	Tidak Kumulatif	100%	100%	100%	100%	100%
6.5	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	Tidak Kumulatif	86	87	88	89	90
6.6	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	Persen	Tidak Kumulatif	90	91	92	93	95
6.7	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	Tidak Kumulatif	1	1	1	1	1
6.8	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Predikat Pengelolaan	Tidak Kumulatif	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
6.9	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	Tidak Kumulatif	80	81	82	83	84
6.10	Maturitas SPIP Unit Kerja	Persen	Tidak Kumulatif	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
6.11	Indeks MR Unit Kerja	Level 1-5	Tidak Kumulatif	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
6.12	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Indeks Skala 100	Tidak Kumulatif	70	76	80	81	82
6.13	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	Tidak Kumulatif	70	73	76	80	81

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia terwujud.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
I	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	2.221
		1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	760.379
		1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	1.300
II	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	2.1	Jumlah Proyek Strategi Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1
		2.2	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85
		2.3	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang diawasi	Topik APPD	2
		2.4	Persentasi Rekomendasi Strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80
III	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	3.1	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	1
		3.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	10
		3.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	4
		3.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	55
		3.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	2
		3.6	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	0
		3.7	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BUMD	0
		3.8	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLU/D	1
IV	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan /ditindaklanjuti	Persen	100
		4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	80
		4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Pemda	3
		4.4	Jumlah Pemda menindak lanjuti Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1
V	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Provinsi	0
		5.2	Jumlah APIP Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	13
		5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Provinsi	1
		5.4	Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	16
		5.5	Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Provinsi	0

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
		5.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	3
		5.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	0
		5.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	20
		5.9	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	20
		5.10	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	0
		5.11	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	6
VI	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75
		6.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82
		6.3	Persentase efektivitas pengendalian intern Unit Kerja (SPIP Unit kerja)	Persen	70
		6.4	Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100
		6.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75
		6.6	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	95
		6.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Indeks Skala 100	80

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis dengan menggunakan aplikasi SIM-HP, SIMA, dan beberapa informasi lainnya yang diperoleh berdasarkan sistem pengumpulan data kinerja yang ada di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja BPKP Tahun 2022. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 menggambarkan capaian kinerja sasaran kegiatan. Indikator kinerja mencerminkan manfaat/hasil dari *output* yang pada umumnya dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator *input* dan *output*, indikator kinerja *input* terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia (SDM) yang dihitung dengan penggunaan orang hari (OH) dan indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.

1. Ringkasan Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan atas enam sasaran kegiatan yang dijabarkan dalam 37 (tiga puluh dua) indikator kinerja, menunjukkan bahwa 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja (78,38%) telah mencapai target, tiga indikator kinerja (8,11%) belum mencapai target dan lima indikator kinerja (13,51%) tidak ada penetapan target target dari pusat.

Ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis sebagaimana tercantum pada tabel di bawah:

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
I	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah					
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rp (Juta)	2.221	5.058,62	227,26	★
1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rp (Juta)	760.379	783.519,08	103,04	★
1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rp (Juta)	1.300	59.890,87	4606,99	★
II	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional					
2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1	2	200	★
2.2	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85	100	117,65	★
2.3	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Topik APPD	2	2	100	★
2.4	Persentasi rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80	73,17	91,46	★
III	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha					
3.1	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	1	1	100	★
3.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	10	12	120	★
3.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	4	4	100	★
3.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	55	55	100	★
3.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	2	5	250	★
3.6	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	0	0	0	★
3.7	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BUMD	0	0	0	★
3.8	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLU/D	1	3	300	★
IV	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi					
4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	★
4.2	Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	80	100	125	★
4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Pemda	3	0	0	★
4.4	Jumlah Pemda menindak lanjuti Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1	3	300	★

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
V	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU					
5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Prov	0	0	0	★
5.2	Jumlah APIP Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	13	14	107,69	★
5.3	Jumlah Pemprov dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	1	1	100	★
5.4	Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	16	17	106,25	★
5.5	Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Prov	0	1	100	★
5.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	3	5	166,67	★
5.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Jumlah	0	0	0	★
5.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	20	80	400	★
5.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	20	20	100	★
5.10	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	0	0	0	★
5.11	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	6	5	83,33	★
VI	Meningkatnya Kualitas Layanan “Ketatausahaan” Unit Kerja					
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	76,30	101,73	★
6.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	84,90	103,54	★
6.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	95,89	136,99	★
6.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	100	100	★
6.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	93,15	124,20	★
6.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95	96,28	101,35	★
6.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80	97,02	121,28	★

Ket: ★ = mencapai/melampaui target; ★ = belum mencapai target

2. Uraian Kinerja

Realisasi kinerja Tahun 2022 berdasarkan sasaran kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai auditor intern pemerintah diuraikan di bawah ini:

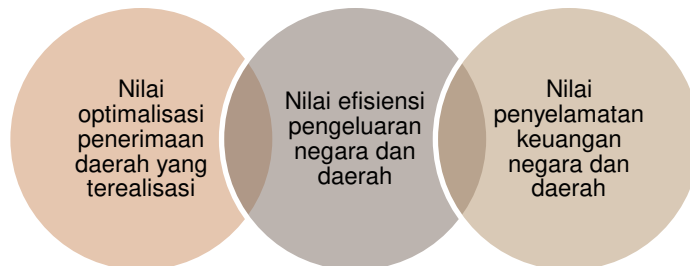
2.1

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1.1	Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi	Rupiah (Juta)	2.221	5.058,62	227,76	★
1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rp (Juta)	760.379	783.519,08	103,04	★
1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan Daerah	Rp (Juta)	1.300	59.890,87	4606,99	★

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah diukur dengan menggunakan tiga indikator kinerja yaitu:



Uraian kinerja atas tiga indikator kinerja sasaran kegiatan: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah, adalah sebagai berikut:

IKK 1-1: Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi

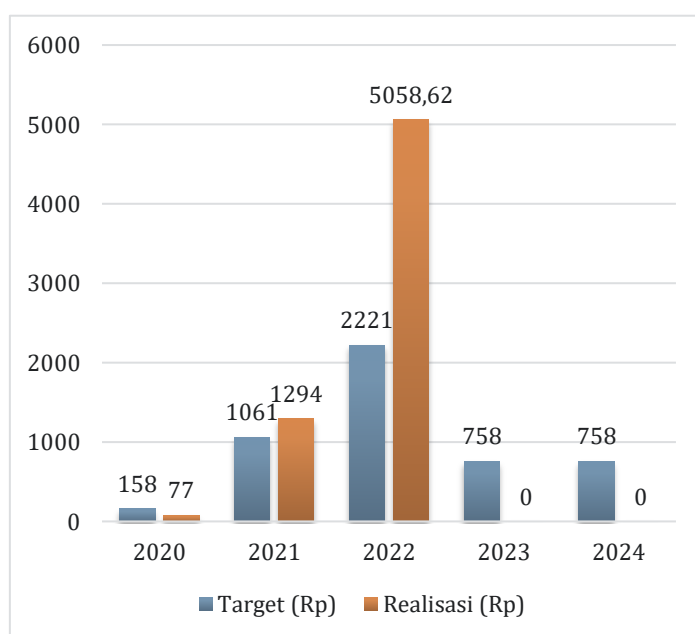
Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi Tahun 2022 sebesar Rp5.058,62 miliar

IKK “nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi” dihitung berdasarkan hasil kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan BPKP. Meliputi evaluasi optimalisasi pendapatan asli daerah dan bimbingan teknis optimalisasi PAD, penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah.

Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi diukur dengan menghitung jumlah kurang bayar atas penerimaan negara/daerah yang sudah disetor/ditetapkan.

Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi tahun 2022 adalah sebesar Rp5.058.622.164,00 atau mencapai 227,76% dari target tahun 2022 sebesar Rp2.221.000.000,00. Rincian dari nilai tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai realisasi penagihan pajak pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	2.504.522.944,00
2.	Nilai realisasi penagihan pajak pada Kabupaten Wajo	828.253.871,00
3.	Nilai realisasi penagihan pajak pada Kota Makassar	1.667.848.659,00
4.	Nilai realisasi penagihan pajak pada Kabupaten Gowa	19.961.980,00
5.	Nilai realisasi penagihan pajak pada Kabupaten Maros	38.034.710,00
Jumlah		5.058.622.164,00



Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi telah mencapai 227,26% ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 121,98%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2024, nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi telah mencapai 270,84%.

Upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk mendukung pencapaian dua kinerja di atas, antara lain:

- 1) Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022.

Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kabupaten Wajo. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong peningkatan kinerja PAD dan mendorong potensi serta penerimaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Monitoring Tindak Lanjut Atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2022.

Monitoring tindak lanjut atas optimalisasi pendapatan asli daerah dilakukan pada Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Kabupaten Wajo. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi hasil evaluasi pendapatan asli daerah.

Dari kedua kegiatan yang telah dilakukan, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Melakukan identifikasi risiko, penilaian dan mitigasi risiko atas kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian optimalisasi PAD;
- 2) Melakukan perbaikan tata kelola pajak dan retribusi daerah;
- 3) Mengoptimalkan tata kelola penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi.

IKK 1-2: Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

*Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah Tahun 2022 sebesar **Rp783,82 miliar***

IKK “Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah” adalah nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan / pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan (belum direalisasi) yang tidak tepat berdasarkan kegiatan pengawasan BPKP. Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah diukur dengan menghitung:

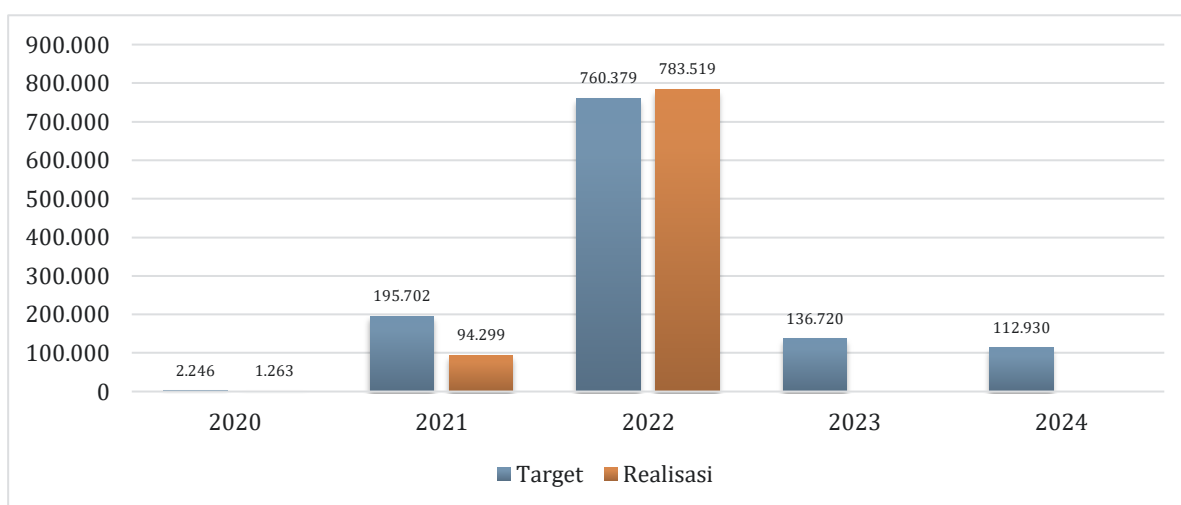
- 1) Nilai anggaran/rencana belanja yang berpotensi menjadi lebih efektif dan efisien dikarenakan:
 - a) Dialihkan ke proyek/kegiatan/program yang lebih berdampak atau lebih hemat;
 - b) Rincian atau metodologi kegiatan diperbaiki sehingga lebih berdampak atau lebih hemat;
 - c) Ukuran/indikator keberhasilan diperbaiki sehingga lebih terukur dan berorientasi hasil.
- 2) Nilai rupiah yang dapat dihemat melalui hasil pengawasan BPKP yang bersifat non-investigatif seperti audit klaim/verifikasi tagihan, koreksi *cost-recovery*, audit penyesuaian harga, audit *cost-saving*, dsb.

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 adalah sebesar

Rp783.519.077.419,10 atau mencapai 103,04% dari target tahun 2022 sebesar Rp760.379.000.000,00.

Ringkasan nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah sebesar Rp783.519.077.419,10 disajikan pada tabel:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Potensi inefektifitas dan inefisiensi berdasarkan evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD	760.379.226.765,00
2.	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil audit	1.665.315.031,29
3.	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil evaluasi	20.208.415.444,89
4.	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil reuiu	1.266.120.177,92
Jumlah		783.519.077.419,10



Dari grafik diatas diketahui bahwa nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah tahun 2022 telah mencapai 103,04% atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 45,56%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2024, nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah telah mencapai target 100%.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan:

- 1) Meningkatkan kesadaran pemda mengenai pentingnya evaluasi perencanaan dan penganggaran;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan instansi yang merupakan obyek pengawasan;
- 3) Peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan PPM.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target “Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah” antara lain:

1) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBD pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran APBD di Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sekaligus memberikan saran perbaikan atas keselarasan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran termasuk tingkat efektivitas serta efisiensinya.

Dari 25 (dua puluh lima) Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, empat Pemda yang dipilih sebagai *sample* yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sinjai, dan Kota Makassar. Hasil evaluasi menunjukkan terdapat potensi *inefektifitas* dan *inefisiensi* untuk masing-masing Pemda sebagai berikut:

No	Pemerintah Daerah	Anggaran Belanja (Rp)	Potensi Inefektifitas (Rp)	Potensi Inefisiensi (Rp)	Total potensi Inefektifitas & Inefisiensi	Persentase (%)
1.	Provinsi Sulawesi Selatan	9.546.532.006.192	429.369.077.482	5.079.523.664	434.448.601.146	4,55%
2.	Kabupaten Enrekang	4.701.694.460.500	87.164.775.881	141.045.300	87.305.821.181	1,86%
3.	Kabupaten Sinjai	1.167.154.692.087	33.228.720.022	201.531.774	33.430.251.796	2,86%
4.	Kota Makassar	1.415.033.219.500	178.783.497.678	26.411.054.964	205.194.552.642	14,5%
Jumlah		16.830.414.378.279	728.546.071.063	31.833.155.702	760.379.226.765	4,52%

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, BPKP telah merekomendasikan:

- a) Melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai peraturan-peraturan terkait penyusunan dokumen perencanaan kepada seluruh OPD;
 - b) Meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah melalui perbaikan kualitas sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan mengenai sasaran, indikator kinerja serta target kinerja;
 - c) Meningkatkan efisiensi penganggaran di setiap OPD dengan mengadopsi prinsip "*Money follow Program*" dimana setiap belanja yang dianggarkan adalah belanja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan program, bukan hanya melaksanakan kegiatan.
- 2) Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil audit Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

No	Jenis Audit	Koreksi Audit
1	Permohonan Audit Pengukuran Hasil Pekerjaan dalam Proses Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Infrastruktur Permukiman Mendukung Wisata Toraja	54.947.726,74

2	Audit Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana Jembatan Sungai Battang Ruas Jalan Batas Kota Palopo-Batas Kabupaten Luwu (Km. 390+875)	116.449.431,55
3	Audit Tujuan Tertentu atas Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Modern Al-Junaidiyah di Kabupaten Bone TA 2021	146.837.763,28
4	Audit Tujuan Tertentu atas Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Sungai Walanae Kabupaten Soppeng Tahun 2022	548.300.044,71
5	Audit Tujuan Tertentu Pasca Putus Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Mata Makassar Tahun Anggaran 2021	786.000.065,01
6	Audit Tujuan Tertentu atas Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19 Tahun 2022	12.780.000,00
Total		1.665.315.031,29

3) Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil evaluasi

a. Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan pada 4 Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Evaluasi atas Pengelolaan Dana BOS Madrasah Tahun Anggaran 2022 pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan rincian permasalahan dan nilai efisiensi sebagai berikut:

Uraian Permasalahan	Nilai Efisiensi
Terdapat indikasi kemahalan/ kelebihan pembayaran pada dokumen pertanggungjawaban Dana BOS Madrasah Tahun 2022.	1.100.000,00

(2) Evaluasi atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2022 pada Kabupaten Jeneponto dengan rincian permasalahan dan nilai efisiensi sebagai berikut:

Uraian Permasalahan	Nilai Efisiensi
Terdapat indikasi kemahalan harga pada dokumen pertanggungjawaban Dana BOS Madrasah Tahun 2022.	5.520.000,00

(1) Evaluasi atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2022 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian permasalahan dan nilai efisiensi sebagai berikut:

No	Uraian Permasalahan	Nilai Efisiensi
1	Realisasi penggunaan Dana BOS Reguler Tahun 2022 tidak sesuai dengan RKAS dan Petunjuk Teknis	13.800.000,00
2	Terdapat indikasi kemahalan harga atas kegiatan/belanja yang menggunakan Dana BOS Reguler Tahun 2022.	6.060.000,00

(2) Evaluasi atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Dasar TA 2022 pada Kabupaten Bone dengan rincian permasalahan dan nilai efisiensi sebagai berikut:

No	Uraian Permasalahan	Nilai Efisiensi
1	Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tidak sesuai dengan petunjuk teknis.	23.750.000,00
2	Biaya transpor yang didanai dana BOS tidak sesuai ketentuan.	43.825.000,00
3	Biaya honor/Jasa yang didanai dari dana BOS tidak sesuai ketentuan.	6.712.500,00
4	Terdapat kewajiban perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan.	9.304.700,00

b. Evaluasi atas Penanggulangan Bencana pada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 s.d. 2022 dengan hasil evaluasi menunjukkan per tanggal 6 Desember 2022 masih terdapat sisa dana DSP yang belum terealisasi dan berpotensi tidak bisa digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp20.095.000.000,00. Atas permasalahan tersebut tim telah memberikan rekomendasi berupa melakukan koordinasi dengan BNPB untuk terkait dengan perpanjangan masa keadaan darurat bencana.

c. Evaluasi atas Program Penanggulangan Bencana dan Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Kabupaten Bantaeng dengan hasil evaluasi yaitu terdapat potensi kemahalan harga sebesar Rp3.343.244,89 pada pekerjaan plesteran dengan mortas tipe S setara 1:3 dan 1:2. Atas permasalahan tersebut tim telah memberikan rekomendasi agar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bantaeng mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3.343.244,89.

4) Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil reviu

a. Reviu kegiatan Program Hibah Air Limbah Setempat dilakukan pada delapan Kabupaten/Kota dengan nilai efisiensi pengeluaran negara sebesar Rp30.000.000,00, dengan rincian:

No	Nama Kabupaten	Nilai Efisiensi (Rp)
1	Kabupaten Sidenreng Rappang	9.000.000,00
2	Kabupaten Maros	3.000.000,00
3	Kabupaten Pinrang	-
4	Kabupaten Bantaeng	-
5	Kabupaten Luwu Timur	-
6	Kabupaten Luwu Utara	9.000.000,00
7	Kota Makassar	6.000.000,00
8	Kota Parepare	3.000.000,00
	Total	30.000.000,00

- b. Reviu kegiatan Program Hibah Air Minum Perdesaan dilakukan pada 6 Kabupaten/Kota dengan nilai efisiensi pengeluaran negara sebesar Rp28.000.000,00, dengan rincian:

No	Nama Kabupaten	Nilai Efisiensi (Rp)
1	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	8.000.000,00
2	Kabupaten Bantaeng	-
3	Kabupaten Luwu Timur	-
4	Kabupaten Luwu Utara	-
5	Kabupaten Toraja Utara	6.000.000,00
6	Kabupaten Luwu	14.000.000,00
Total		28.000.000,00

- c. Reviu progress pekerjaan konstruksi lanjutan pembangunan gedung Rumah Sakit Mata Makassar Tahun Anggaran 2022 dengan hasil reviu menunjukkan bahwa terdapat volume pekerjaan kurang sebesar Rp828.227.960,76 dan volume pekerjaan lebih sebesar Rp379.892.217,16 yang berpotensi kelebihan pembayaran. Atas permasalahan tersebut tim telah memberikan rekomendasi berupa kontraktor pelaksana dan manajemen konstruksi melakukan perhitungan volume MC 100% secara akurat termasuk memperhatikan selisih volume dalam laporan progres pekerjaan 93,62% dengan hasil observasi fisik tim reviu.

IKK 1-3: Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

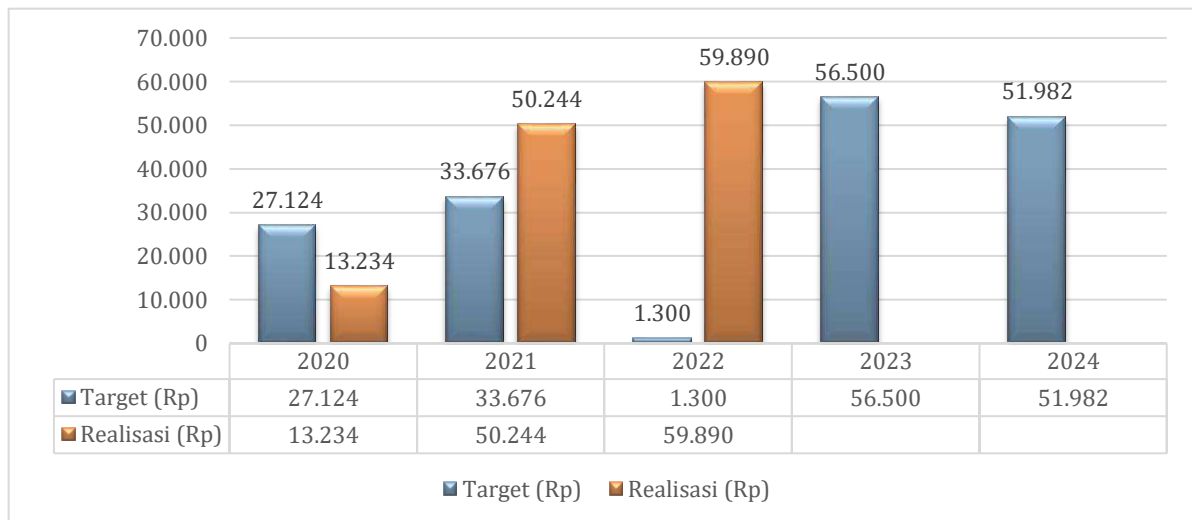
*Nilai Penyelamatan
Keuangan Negara dan
Daerah Tahun 2022
sebesar Rp59,89 miliar*

IKK “Nilai penyelamatan keuangan Negara dan Daerah” adalah nilai yang menunjukkan besarnya jumlah temuan pengembalian ke kas negara atas belanja yang sudah direalisasikan dan/atau pemulihan hak negara atas aset negara

Nilai penyelamatan keuangan Negara dan Daerah diukur dengan menghitung nilai belanja yang dikembalikan ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP dan nilai aset yang dipulihkan.

Nilai penyelamatan keuangan Negara dan Daerah berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp59.890.866.958,32 atau mencapai 4.606,99% dari target revisi tahun 2022 sebesar Rp1.300.000.000,00. Ringkasan Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah sebesar Rp59.890.866.958,32 disajikan pada tabel:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah berdasarkan hasil audit	58.450.130.915,66
2.	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah berdasarkan hasil revidu	1.440.736.042,66
Jumlah		59.890.866.958,32



Dari grafik diatas diketahui persentase nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah tahun 2022 telah mencapai 4.606,99% atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 149,20%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2024, nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi telah mencapai target yang diharapkan.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target “Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah” antara lain:

1) Audit atas Laporan Keuangan

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Pengawasan atas proyek yang dibiayai oleh Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri dalam bentuk Audit Dukungan Laporan Keuangan. Audit ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan proyek, efektivitas sistem pengendalian intern proyek, dan serta ketaatan terhadap ketentuan proyek yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Program/*Project Implementation Unit*.

Audit laporan keuangan dilakukan pada beberapa program dan menunjukkan nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah penyelamatan dalam bentuk rekomendasi penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp1.664.110.610,98, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Nilai (Rp)
1	Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Dam Operational and Safety Project Phase II /DOISP II (Loan IBRD No.8711 ID dan Loan AIIB No. 000010-1-IDN) pada PIU Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang untuk Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2021	1.610.716.701,98
2	Audit atas Laporan Keuangan IPDMIP Loan IPAD No. 2000001445 pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Sulsel	16.381.595,00
3	Audit atas Laporan Keuangan Participatory and Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) Loan IFAD No. 2.000001445 Tahun anggaran 2021 – Wajo	8.153.800,00
5	Audit atas Laporan Keuangan Participatory and Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) Loan IFAD No. 2.000001445 Tahun anggaran 2021 – Soppeng	2.264.000,00
6	Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/(PAMSIMAS) (Loan IBRD 8578) Provinsi Sulawesi Selatan TA 2021 – Bone	1.200.000,00
7	Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/(PAMSIMAS) (Loan IBRD 8578) Provinsi Sulawesi Selatan TA 2021 – Enrekang	6.420.000,00
8	Audit atas Laporan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)/National Slum Upgrading Project (NSUP) Loan IBRD No 8636 dan Loan AIIB-0004-IDN pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan dengan Uji Petik pada Kabupaten Gowa untuk TA 2021	13.440.000,00
9	Audit atas Laporan Keuangan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) World Bank Loan No 8636 dan Loan AIIB LN 0004-IDN Tahun Anggaran 2021	1.350.000,00
10	Audit atas Laporan Keuangan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) World Bank Loan IBRD No. 8636-ID dan Loan AIIB LN 0004-IDN Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2021	4.184.514,00
Jumlah		1.664.110.610,98

2) Audit Lainnya (Kinerja dan Operasional)

Pengawasan dalam bentuk audit lainnya berupa audit kinerja atas program pengembangan infrastruktur. Audit ini bertujuan untuk menilai **keberhasilan** pelaksanaan atau penyelenggaraan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Wilayah.

Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah dalam bentuk rekomendasi penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp59.649.372,99, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Nilai (Rp)
1	Audit Kinerja Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Kementerian PUPR Tahun 2021 pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel	59.649.372,99
Jumlah		59.649.372,99

3) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Wilayah Sulawesi Selatan

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah adalah melalui audit investigasi dan audit penghitungan kerugian keuangan negara di Wilayah Sulawesi Selatan yang dilakukan untuk memenuhi permintaan penyidik/aparat penegak hukum di Provinsi Sulawesi Selatan.

Audit ini bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pengawasan melalui audit investigasi dan audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah sebanyak 20 (dua puluh) penugasan dengan nilai penyelamatan keuangan negara/daerah sebesar Rp56.726.370.931,69 yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah Penugasan	Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	APBN	4	2.027.112.035,55
2	APBD	7	10.797.253.718,31
3	APBDesa	2	9.338.682.803,23
4	BUMN	4	11.994.710.399,00
5	BUMD	3	22.568.611.975,60
Jumlah		20	56.726.370.931,69

- 4) Reviu *Provisional Hand Over* (PHO) atas Kontrak Pembangunan Ruang *Pediatric* ICU (PICU) dan *Neonatal* ICU (NICU) RSUD dr.Pallemai Tandi Kota Palopo dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan kegiatan atas kontrak Pembangunan Ruang *Pediatric* ICU (PICU) dan *Neonatal* ICU (NICU) RSUD dr.Pallemai Tandi Kota Palopo dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Kepala

Dinas Kesehatan Kota Palopo dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan pekerjaan. Hasil reviu menyimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan volume pekerjaan gedung Pediatric (ICU) dan Neonatal ICU (NICU) sebesar Rp16.585.788,34 dan terdapat item baru setelah CCO yang belum didukung dengan ketentuan administrasi yang berlaku. Atas permasalahan tersebut, tim telah memberikan rekomendasi berupa penyetoran kembali ke kas daerah sebesar Rp16.585.788,34 dan melengkapi dokumen persyaratan administrasi terhadap item baru (CCO) sesuai ketentuan yang berlaku.

- 5) Reviu Penilaian Bobot Fisik Pekerjaan pada Tahap Pemutusan Kontrak Pembangunan Jembatan Soreang Lopie Kecamatan Belawa pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo. Tujuan penugasan ini adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan penilaian bobot fisik pekerjaan pada tahap pemutusan kontrak pembangunan Jembatan Soreang Lopie Kecamatan Belawa pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo telah sesuai prosedur dan ketentuan sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan bagi Kepala Daerah Kabupaten Wajo. Tim telah memberikan rekomendasi berupa penyetoran ke kas daerah atas selisih pembayaran kepada penyedia sebesar Rp940.711.131,00 dan melakukan penarikan kelebihan pembayaran kepada penyedia melalui kompensasi jaminan pelaksanaan sebesar Rp483.439.123,32 yang selanjutnya disetor ke kas daerah.

2.2

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1	2	200	★
2.2	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85	100	117,65	★

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
2.3	Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi	Topik APPD	2	2	100	★
2.4	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80	73,17	91,46	★

Pencapaian sasaran kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional diukur dengan menggunakan empat indikator kinerja yaitu:



Uraian kinerja atas empat indikator kinerja sasaran kegiatan: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:

IKK 2-1: Jumlah PSN yang Tercapai Sesuai Target

Jumlah PSN yang tercapai Tahun 2022 sebanyak 2 (dua) Proyek Strategis Nasional.

IKK “Jumlah PSN yang tercapai sesuai target” adalah Jumlah PSN yang tercapai targetnya sesuai target kinerja pada dokumen perencanaan yang sah.

Indikator ini digunakan untuk menilai keberhasilan Proyek Strategis Nasional dalam mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2022, jumlah program strategis nasional yang tercapai sesuai target sebanyak dua PSN atau mencapai 200% dari target tahun 2022 yaitu proyek pembangunan Bendungan Paselloeng yang berlokasi di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dan proyek pembangunan Bendungan Karalloe yang berlokasi di Kabupaten Gowa dengan progres masing-masing sebesar 100% dan telah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 9 September 2021 untuk Bendungan Passelloeng dan pada tanggal 23 November 2021 untuk Bendungan Karalloe.

IKU 2-2: Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan

Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan Tahun 2022 sebesar 100%

IKK “Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan” diukur dengan jumlah Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha (KLPBU) yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dibagi dengan jumlah Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (Evaluasi HKP).

Hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan sebanyak empat rekomendasi hasil pengawasan yaitu evaluasi hambatan kelancaran pembangunan pemasangan Jaringan Pipa Distribusi dan Pembangunan Rumah Pompa di Kawasan KIMA, penyelesaian permasalahan tanah dan bangunan antara Kemendesa PDTT dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, mediasi penyelesaian klaim RSUD Pongtiku dengan BPJS Kesehatan Cabang Makale dan identifikasi dan pengembangan informasi awal atas program/kegiatan di kawasan Maros, Makassar, Sungguminasa, Takalar (Mamminasata) yang terdapat permasalahan hambatan kelancaran pembangunan.

Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan Tahun 2022 sebesar 100% dari target sebesar 85%.

IKU 2-3: Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi

Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah Tahun 2022 sebanyak 2 (dua) Pembangunan Prioritas Daerah

IKK “Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” diukur dengan jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi dibandingkan dengan jumlah topik APPD.

Pada tahun 2022 jumlah kegiatan pembangunan prioritas yang diawasi berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi sebanyak dua kegiatan pembangunan prioritas daerah atau mencapai 100% dari target tahun 2022. Adapun kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi yakni: 1) Evaluasi Pengembangan Kawasan Geopark Nasional Maros Pangkep; dan 2) Evaluasi atas Pengembangan Kawasan Luwu dan Sekitarnya.

IKU 2-4: Persentasi Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti

Persentasi rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti tahun 2022 adalah sebesar 73,17%

IKK “Persentasi rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti” diukur dengan menghitung banyaknya rekomendasi strategis yang dihasilkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan kepada *stakeholders* terkait yang ditindaklanjuti.

Indikator ini digunakan untuk menunjukkan sejauhmana perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang di sampaikan kepada *stakeholders* yakni provinsi/kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti.

Pada tahun 2022, persentasi rekomendasi strategis yang telah ditindaklanjuti sebesar 73,17% atau mencapai 91,46% dari target tahun 2022 sebesar 80%.

Hambatan tidak tercapainya target tersebut karena belum optimalnya *stakeholders* dalam melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan.

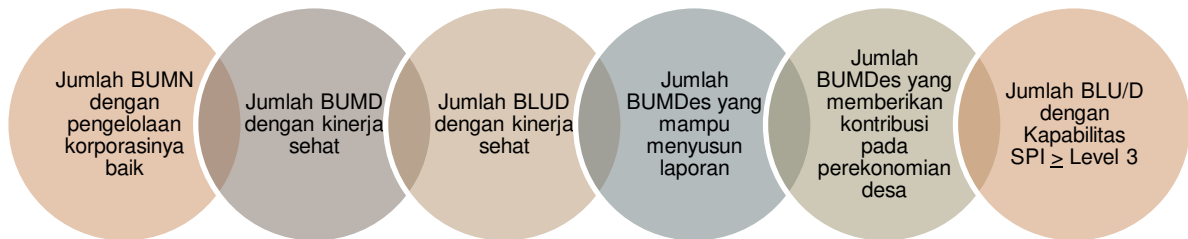
2.3

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
3.1	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	1	1	100,00%	★
3.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	10	12	120,00%	★
3.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	4	4	100,00%	★
3.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	55	55	100,00%	★
3.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	2	5	250,00%	★
3.6	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	0	0	0%	★
3.7	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BUMD	0	0	0%	★
3.8	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLU/D	1	3	300,00%	★

Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas badan usaha diukur dengan menggunakan delapan indikator kinerja. Namun terdapat dua indikator kinerja yang nilai target setelah revisi adalah nol dan tidak terdapat realisasi, sehingga untuk capaian kinerja akan dibahas terhadap enam indikator kinerja yakni:



IKK 3-1: Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik

*Jumlah BUMN dengan dengan pengelolaan korporasinya baik Tahun 2022 sebanyak **1 BUMN***

IKK jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik diukur dengan BUMN pengelolaan korporasinya minimal “Baik”. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan penilaian GCG dan ICORPAX pada BUMN yang merupakan mitra Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Selatan dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama BUMN	Penilaian	Skor	Predikat
1	PT Perkebunan Nusantara (PN) XIV	GCG	80,91	Baik
		ICORPAX	49,19	Cukup
2	PT Semen Tonasa	ICORPAX	65.70	Baik
3	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	ICORPAX	58,52	Cukup

Jumlah BUMN dengan skor GCG predikat baik adalah satu BUMN, sedangkan untuk BUMN dengan skor ICORPAX predikat baik adalah satu BUMN atau mencapai 100% dari taeget tahun 2022 sebanyak satu BUMN.

IKK 3-2: Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

*Jumlah BUMD dengan kinerja sehat Tahun 2022 sebanyak **12 BUMD***

IKU jumlah BUMD dengan kinerja sehat diukur dengan menghitung jumlah BUMD dengan kinerja minimal “Sehat” dibagi jumlah total BUMD yang ada di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran

Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan kinerja pengelolaan BUMD. Target kinerja ini pada tahun 2022 telah di revisi menjadi sepuluh BUMD. Evaluasi kinerja BUMD Air Minum bertujuan untuk menilai tingkat Kesehatan BUMD Air Minum berdasarkan indikator dari Kementerian

PUPR dan Kementerian Dalam Negeri serta untuk memperoleh informasi lainnya yang relevan dengan APP.

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan evaluasi kinerja pada 23 (dua puluh tiga) PDAM/PERUMDAM di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Buku 2021, Jumlah BUMD dengan kinerja sehat sebanyak 12 (dua belas) PDAM/PERUMDAM atau mencapai 120% dari target tahun 2022 sebanyak sepuluh PDAM/PERUMDAM, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Nama PDAM	Jumlah Hasil Penilaian	Tingkat Kesehatan
1	Perumda Air Minum Kota Makassar	3,07	Sehat
2	Perumda Air Minum Tirta Bantimurung Kab Maros	3,40	Sehat
3	Perumda Air Minum Tirta Mangkakulu Kota Palopo	3,66	Sehat
4	Perumda Air Minum Tirta Sinjai Bersatu Kab Sinjai	2,82	Sehat
5	Perumda Air Minum Kabupaten Toraja Utara	2,48	Kurang Sehat
6	PDAM Tirta Jeneberang Kab Gowa	3,22	Sehat
7	PDAM Kab Takalar	2,87	Sehat
8	PDAM Kota Parepare	3,00	Sehat
9	PDAM Tirta Bukae Kab Luwu Utara	2,96	Sehat
10	PDAM Tirta Massenrempulu Kab Enrekang	2,81	Sehat
11	PDAM Kab Luwu	2,84	Sehat
12	PDAM Kab Luwu Timur	2,85	Sehat
13	PDAM Kab Bantaeng	2,39	Kurang Sehat
14	PDAM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	2,28	Kurang Sehat
15	PDAM Kabupaten Soppeng	1,74	Sakit
16	PDAM Kabupaten Wajo	2,54	Kurang Sehat
17	PDAM Tirta Nenemallomo Kab Sidenreng Rappang	2,49	Kurang Sehat
18	Perumda Air Minum Tirta Waesai Kab Barru	2,90	Sehat
19	PDAM Kabupaten Jenepono	2,19	Sakit
20	PDAM Kabupaten Tana Toraja	2,13	Sakit
21	PDAM Wae Manurung Kab Bone	2,48	Kurang Sehat
22	PDAM Kabupaten Kepulauan Selayar	1,91	Sakit
23	PDAM Kabupaten Bulukumba	1,76	Sakit
24	PDAM Kabupaten Pinrang	Tidak Dievaluasi	

Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2024 sebanyak 11 PDAM/PERUMDAM, jumlah BUMD dengan kinerja sehat telah mencapai 109%.

Perkembangan realisasi jumlah BUMD dengan kinerja sehat tahun 2022, dan perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut:



Terdapat empat BUMD mengalami peningkatan kinerja sehat dan satu BUMD yang mengalami penurunan kinerja sehat dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu Perumda Air Minum Kabupaten Toraja Utara. Penurunan pada satu BUMD

tersebut antara lain disebabkan aliran air ke pelanggan mengalami gangguan karena banyaknya pipa distribusi yang bocor akibat pekerjaan pelebaran jalan Rantepao-Saddan dan pekerjaan proyek Pedestrian di Rantepao serta mata air Wairedede yang terkena longsor sehingga jumlah pemakaian air pelanggan menurun. Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

- Evaluasi kinerja PDAM/PERUMDAM
- Bimtek Manajemen Risiko
- Bimtek Penyusunan RKA
- Penilaian awal *initial assessment* kapabilitas SPI
- Diagnostic Assessment* GCG

IKK 3-3: Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat

Jumlah BLUD Dengan Kinerja Sehat Tahun 2022 sebanyak 4 BLUD

Jumlah BLUD dengan kinerja minimal “Sehat” diukur dengan jumlah BLUD dengan kinerja minimal “Sehat” dibagi jumlah total BLUD yang ada di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran Pengawasan

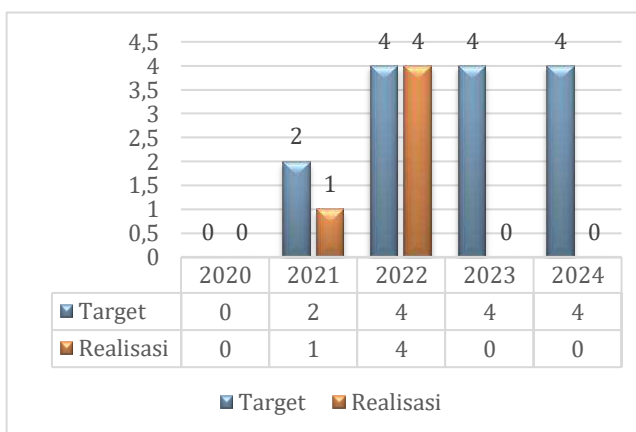
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan kinerja pengelolaan BLUD. Target kinerja ini pada tahun 2022 sebanyak empat BLUD.

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pengelolaan RSUD BLUD. Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan evaluasi kinerja pada lima BLUD Rumah Sakit di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Buku 2021, Jumlah BLUD dengan kinerja sehat sebanyak empat BLUD Rumah Sakit atau mencapai

100% dari target tahun 2022 sebesar empat BLUD, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Nama BLUD	Hasil Penilaian	Tingkat Kesehatan
1.	RSUD La Patarai Kab Barru	71,41	Baik/Sehat
2.	RSUD Kota Makassar	63,93	Sedang/Kurang Sehat
3.	RSUD Labuang Baji Sulawesi Selatan	82,19	Baik/Sehat
4.	RSUD Haji Sulawesi Selatan	72,26	Baik/Sehat
5.	RSUD Dr. H. Anwar Makkaturu Kab. Bantaeng	75,82	Baik/Sehat

Perkembangan realisasi jumlah BLUD dengan kinerja sehat tahun 2022, dan perbandingan realisasi tahun 2021 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada grafik. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2024, jumlah BLUD dengan kinerja sehat telah mencapai 100%.



Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

- 1) Evaluasi Kinerja BLUD Tahun Buku 2021;
- 2) Bimbingan Teknis Manajemen Risiko;
- 3) *Mapping* penilaian awal penerapan manajemen risiko dan tata kelola BLUD.

IKK 3-4: Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan

Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan Tahun 2022 Sebanyak 55 Bumdes.

BUM Desa yang mampu menyusun laporan keuangan adalah BUM

No	Nama Kabupaten	Jumlah BUMDes yang mampu Menyusun laporan keuangan
1.	Bulukumba	8
2.	Gowa	17
3.	Maros	17
4.	Sidrap	8
5.	Takalar	5
Jumlah		55

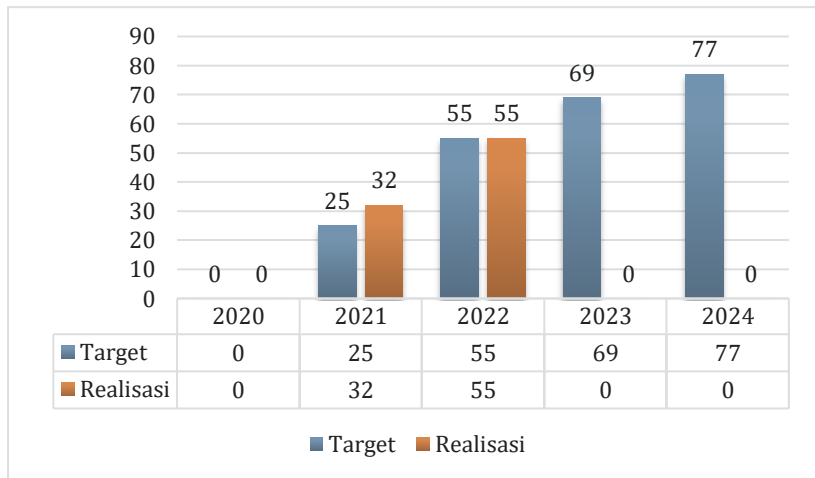
Desa yang dapat menyusun laporan keuangan setelah dilakukan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan dari BPKP.

Jumlah BUM Desa yang mampu menyusun laporan keuangan diukur berdasarkan hasil monitoring pada BUM Desa di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menyusun laporan keuangan dan telah di-*input* pada aplikasi Pandan Desa.

Jumlah BUM Desa yang mampu menyusun laporan Keuangan tahun 2022 adalah sebanyak 55 BUM Desa dari target tahun 2022 sebanyak 55 BUM Desa atau telah mencapai 100%. Ringkasan Jumlah BUM Desa yang telah menyusun laporan keuangan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Perkembangan realisasi jumlah BUM Desa yang mampu menyusun laporan keuangan dan perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut:

Dari grafik tersebut, terlihat jumlah BUM Desa yang telah menyusun laporan keuangan telah mencapai 100,00%. Apabila dibandingkan dengan target akhir



periode Renstra Tahun 2024, jumlah BUM Desa yang telah menyusun laporan keuangan telah mencapai 71,43%.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

- a) Bimbingan teknis Aplikasi SIA BUM Desa;
- b) Monitoring penyusunan laporan keuangan BUM Desa;
- c) Monitoring tata kelola BUM Desa.

IKK 3-5: Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa

Jumlah BUM Desa yang memberikan kontribusi pada perekonomian tahun 2022 sebanyak 5 BUM Desa

IKK Jumlah BUM Desa yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa diukur dengan jumlah BUM Desa yang mampu memberikan deviden ke kas desa dan/mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan anggota BUM Desa. Pada tahun 2022 realisasi BUM Desa yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa

sebanyak lima BUM Desa dari target tahun 2022 sebanyak dua BUM Desa atau mencapai 250%, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No	Nama BUM Desa	Kontribusi BUM Desa ke Desa (Rp)
1	BUM Desa Mitra Jaya	6.478.544,00
2	BUM Desa Karya Bersama	60.824.000,00
3	BUM Desa Bina Mandiri	25.500.000,00
4	BUM Desa Appakabaji	6.000.000,00
5	BUM Desa Turunan Tang Ma'ti	1.710.625,00

IKK 3-6: Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik

Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik tahun 2022 sebanyak 0 BUMD.

IKK jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik diukur dengan BUMD pengelolaan korporasinya minimal "Baik". Pada tahun 2022 Rendal tidak menetapkan target dan tidak terdapat realiasi BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik.

IKK 3-7: Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

Jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 Tahun 2022 Sebanyak 0 BUMD.

IKK ini dihitung dengan menghitung jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI level 3. Jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 berdasarkan hasil *mapping* yang dilakukan dengan pengisian kuesioner terkait kapabilitas SPI yang kemudian hasilnya diolah oleh Direktorat Pengawasan BLU, BLUD, Badan Usaha Jasa Air, BUMD, dan BUMDes. Pada tahun 2022 Rendal tidak menetapkan target dan tidak terdapat realiasi BUMD dengan kapabilitas SPI level 3.

IKK 3-8: Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

Jumlah BLU/D dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 Tahun 2022 Sebanyak 3 BLU/BLUD.

IKK ini dihitung dengan menghitung jumlah BLU/BLUD dengan kapabilitas SPI level 3. Jumlah BLU/BLUD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 berdasarkan hasil *mapping* yang dilakukan dengan pengisian kuesioner terkait kapabilitas SPI yang kemudian hasilnya diolah oleh Direktorat Pengawasan BLU, BLUD, Badan Usaha Jasa Air, BUMD dan BUMDes adalah sebanyak tiga BLU/BLUD dari target tahun 2022 sebanyak satu BLU/BLUD atau telah mencapai 300%, dengan ringkasan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No	Nama BLU/D	Skor	Predikat
1.	Politeknik Penerbangan Makassar	100	3
2.	RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Provinsi Sulawesi Selatan	97,5	3
3.	RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu	82,5	3

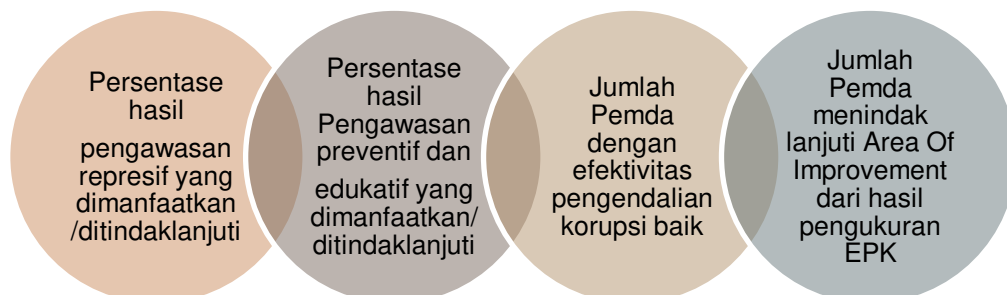
2.4

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan /ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00%	★
4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	80	100	125,00%	★
4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Pemda	3	0	0,00%	★
4.4	Jumlah Pemda menindak lanjuti <i>Area Of Improvement</i> dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1	3	300,00%	★

Pencapaian sasaran kegiatan 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi diukur dengan menggunakan empat indikator kinerja yaitu:



Uraian kinerja atas empat indikator kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi adalah:

IKK 4-1: Persentase hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti

Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan / ditindaklanjuti Tahun 2022 sebesar 100%

IKK “Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti” diukur dengan jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/ Aparat Penegak Hukum (KLPBU/APH) yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan represif (audit investigasi, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan audit tujuan tertentu lainnya bidang investigasi) dibagi dengan jumlah penugasan pengawasan represif berdasarkan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan BPKP.

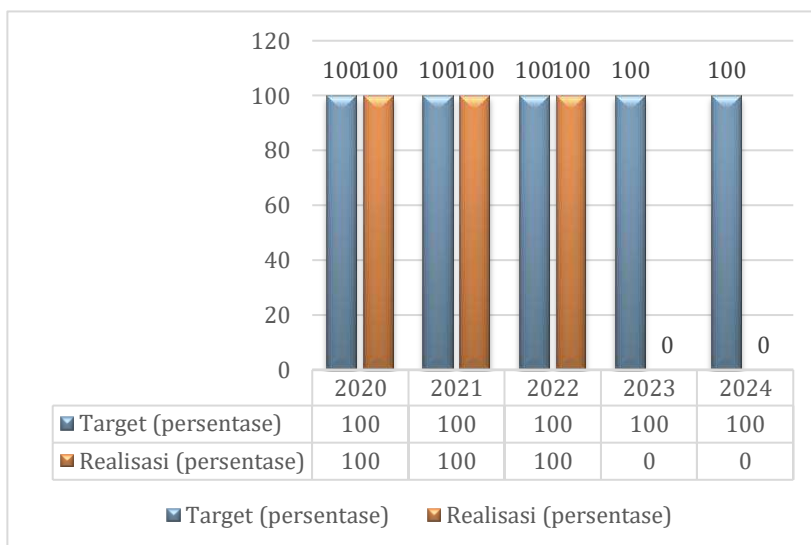
Dalam hal penerimaan penugasan bersumber dari APH, tindak lanjut yang dimaksud adalah digunakannya laporan hasil audit sebagai bukti surat dalam berkas penyelidikan/penyidikan/penuntutan. Dalam hal penerimaan penugasan bersumber dari K/L/P/BU, tindak lanjut dimaksud adalah tindakan korektif dan/atau tindak lanjut hukum sebagaimana dinyatakan dalam rekomendasi.

Target kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100%. Pada Tahun 2022 persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sebanyak 69 (enam puluh sembilan) penugasan dari total 69 (enam puluh sembilan) penugasan represif atau mencapai 100% dari target tahun 2022.

Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti tahun 2022 diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

- 1) Deputi Bidang Investigasi menindaklanjuti satu penugasan Audit Tujuan Tertentu.
- 2) Penyidik menindaklanjuti 68 (enam puluh delapan) penugasan audit investigasi, audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan pemberian keterangan ahli di hadapan penyidik dan persidangan.

Perkembangan realisasi persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti dari target tahun 2022-2024. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti telah mencapai 100%. Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas yaitu melakukan monitoring tindak lanjut hasil audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara.



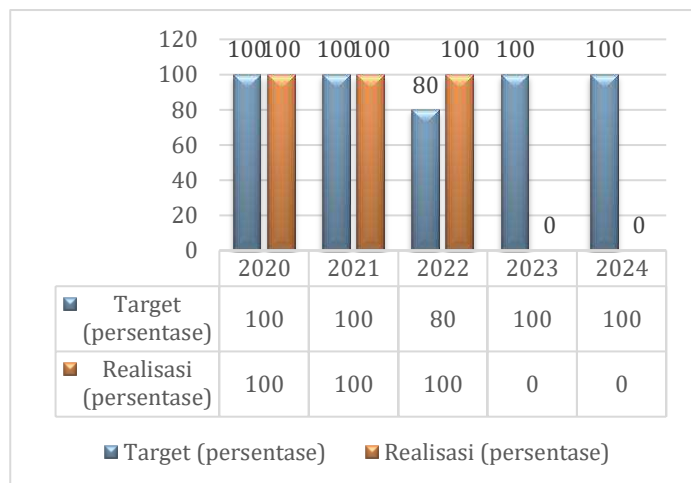
Capaian kinerja yang sesuai target antara lain didukung dengan monitoring tindak lanjut hasil audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan koordinasi yang baik dengan APH.

IKU 4-2: Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti

Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan / ditindaklanjuti Tahun 2022 sebesar 100%

IKK “Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan atau Ditindaklanjuti” diukur dengan jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Badan Usaha (KLPBU) yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan preventif dan edukatif dibagi dengan jumlah penugasan pengawasan preventif dan edukatif. Pengawasan preventif terdiri dari Profiling Risiko *Fraud* sedangkan pengawasan edukatif berupa pembentukan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dan *Coaching Clinic*.

Target kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 80%. Pada Tahun 2022, persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti sebanyak 14 (empat belas) rekomendasi dari 14 (empat belas) penugasan atau mencapai 125% dari target



tahun 2022. Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti tahun 2022 sebanyak 14 (empat belas) rekomendasi diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidwas Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berupa enam kegiatan *Profiling Risiko Fraud*, satu kegiatan MPAK, dan tujuh kegiatan *Coaching Clinic*.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

- 1) Meningkatkan kompetensi Auditor dengan mengikuti diklat FCP dan MPAK.
- 2) Berkoordinasi dengan Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan program pengawasan preventif dan edukatif.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung oleh kesadaran dari KLPBU tentang pentingnya mencegah korupsi.

IKU 4-3: Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik masih 0%

IKK “Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” di Sulawesi Selatan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan saat ini capaiannya masih 0% karena Pemda masih berfokus untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dari beberapa faktor lain diantaranya terkait SPIP.

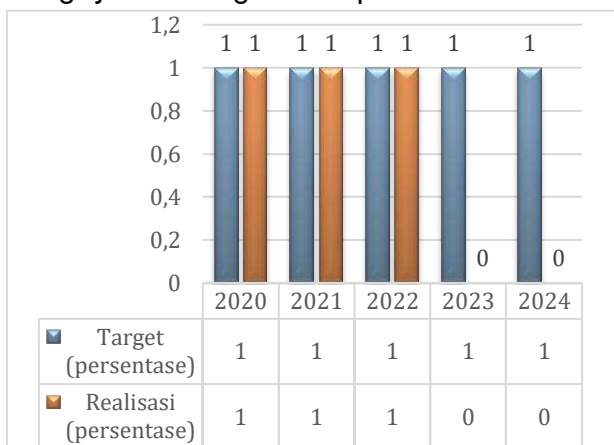
IKK 4-4: Jumlah Pemda Menindaklanjuti Area of Improvement dari Hasil pengukuran EPK

Jumlah Pemda Menindaklanjuti Area of Improvement dari Hasil pengukuran EPK yaitu 1

IKK “Jumlah Pemda Menindaklanjuti Area of Improvement dari hasil pengukuran EPK” adalah jumlah yang menunjukkan jumlah pemerintah daerah yang

menindaklanjuti *Area of Improvement* dari hasil pengukuran EPK berdasarkan kegiatan pengawasan BPKP.

Jumlah pemda menindaklanjuti *Area of Improvement* dari hasil pengukuran EPK diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak tiga pemda dari target tahun 2022. Hasil pengawasan berasal dari kegiatan bimtek Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dalam rangka maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Gowa. Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung oleh kesadaran dari KLPBU tentang pentingnya mencegah korupsi.



Perkembangan realisasi persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan atau ditindaklanjuti tahun 2022, dibandingkan dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada disamping. Grafik disamping menunjukkan jumlah pemda

menindaklanjuti *Area of Improvement* dari Hasil pengukuran EPK telah mencapai target tahun 2022.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu berkoordinasi dengan Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan program EPK.

2.5

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq	Provinsi	0	0	0%	★
5.2	Jumlah APIP	Kab/Kota	13	14	107,69	★

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
	Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3					
5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	1	1	100	★
5.4	Jumlah Kabupaten /Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	16	17	106,25	★
5.5	Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Prov	0	1	100	★
5.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	3	5	166,67	★
5.7	Jumlah pemda akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	0	0	0%	★
5.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	20	80	400	★
5.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	20	20	100	★
5.10	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	0	0	0%	★
5.11	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	6	5	83,33	★

Meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern K/L/Pemda/BU diukur dengan menggunakan sebelas indikator kinerja. Namun, dari sebelas indikator kinerja terdapat tiga indikator kinerja yang target dan realisasinya sama dengan nol. Sehingga penjelasan hanya terhadap delapan indikator kinerja, yakni:



IKU 5-1: Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Kapabilitas APIP Daerah Level 3 pada tahun 2022 sebanyak 0 APIP

IKU Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 diukur dengan menghitung jumlah APIP Provinsi dengan level kapabilitas APIP \geq Level 3. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan Kapabilitas APIP Level 3. Pada tahun 2022, Rendal tidak menetapkan target APIP Provinsi dan tidak terdapat realisasi APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP Level 3.

IKU 5-2: Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Kapabilitas APIP Daerah Level 3 pada tahun 2022 sebanyak 14 APIP

IKU Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 diukur dengan menghitung jumlah APIP Pemda dengan level kapabilitas APIP \geq Level 3, dibandingkan dengan jumlah total APIP Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator ini digunakan untuk mengukur

sejauh mana peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan Kapabilitas APIP Level 3. Target kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebanyak 13 (tiga belas) APIP.

Pada Tahun 2022, jumlah APIP K/L/Pemda dengan kapabilitas APIP \geq Level 3

sebanyak 13 APIP. Jumlah APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 per 31 Desember 2022 sebanyak 14 APIP diperoleh atas Reviu Panel Pusat dan *Quality Assurance* yang dilakukan oleh Bidang Program Pelaporan dan Pembinaan APIP BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Perkembangan realisasi Jumlah APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada grafik.

No	Nama Inspektorat (APIP)	Level Kapabilitas	Status
1	Inspektorat Kota Makassar	3	Reviu Pusat
2	Inspektorat Kabupaten Enrekang	3	Reviu Pusat
3	Inspektorat Kabupaten Sinjai	3	Reviu Pusat
4	Inspektorat Kota Palopo	3	Reviu Pusat
5	Inspektorat Kabupaten Bantaeng	3	Reviu Pusat
6	Inspektorat Kabupaten Gowa	3	Reviu Pusat
7	Inspektorat Kabupaten Maros	3	Reviu Pusat
8	Inspektorat Kabupaten Wajo	3	Reviu Pusat
9	Inspektorat Kota Parepare	3	Reviu Pusat
10	Inspektorat Kabupaten Bone	3	Reviu Pusat
11	Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	3	Reviu Pusat
12	Inspektorat Kabupaten Luwu Utara	3	Reviu Pusat
13	Inspektorat Kabupaten Pinang	3	Reviu Pusat
14	Inspektorat Kabupaten Sidrap	3	Reviu Pusat
Jumlah level 3 IA-CM		14	

Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 telah mencapai 71,43% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024. Upaya-upaya penting yang telah dilakukan



dalam tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

- 1) Bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP pada sembilan Inspektorat yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Barru, Enrekang, Soppeng, Luwu, Luwu Timur, Pangkajene Kepulauan, dan Toraja Utara.
- 2) *Quality Assurance* atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP Level 3 pada seluruh Inspektorat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3) Ekpose Panel Kedeputan atas Hasil QA Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kota Makassar, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sinjai.
- 4) Diseminasi/Workshop/Coaching Clinic Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan upaya sebagaimana yang telah dilakukan selama tahun 2022 yaitu:

- 1) Bimbingan teknis peningkatan Kapabilitas APIP Level 3;
- 2) Secara berkala menyelenggarakan forum pengawasan bagi pimpinan APIP yang didalamnya mempromosikan peningkatan kapabilitas APIP.

IKU 5-3: Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 Tahun 2022 sebanyak 1 Pemerintah Provinsi

Tingkat maturitas SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Rumus pengukuran IKK “Jumlah Pemerintah Provinsi dengan level Maturitas SPIP \geq Level 3” adalah dengan menghitung jumlah Pemerintah Provinsi dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3.

Jumlah Pemerintah Provinsi dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3 adalah sebanyak 1 Pemerintah Provinsi atau mencapai 100% dari target tahun 2022 sebesar 1 Pemerintah Provinsi. Adapun realisasi capaian berasal dari nilai maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,103 (hasil Validasi Perwakilan).

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

- 1) Penyelenggaraan forum SPIP yang diikuti oleh pimpinan daerah;

- 2) Bimbingan teknis/sosialisasi pada pemerintah daerah terkait maturitas penyelenggaraan SPIP, baik secara daring maupun tatap muka;
- 3) Pemberian plakat penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah menerapkan penyelenggaraan SPIP level 3.

IKU 5-4: Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

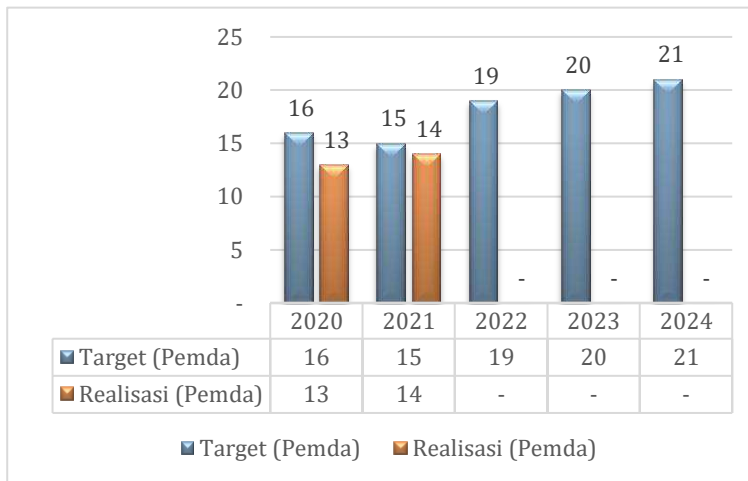
Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 Tahun 2022 sebanyak 17 Kab/Kota dengan 2 pemda menunggu SP Deputi, 14 Validasi Perwakilan, dan 1 Evaluasi Perwakilan

Tingkat maturitas SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Rumus pengukuran IKU “Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” adalah dengan menghitung jumlah

Kab/Kota dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3.

Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 adalah sebanyak dua pemda menunggu SP Deputi, 14 (empat belas) validasi perwakilan, dan satu evaluasi perwakilan. Capaian level Maturitas Penyelenggaraan SPIP menggunakan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.

No	Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	Ket.
1	Kota Parepare	3,353	3	Menunggu SP
2	Kota Makassar	3,281	3	Validasi Perwakilan
3	Kabupaten Sinjai	3,270	3	Menunggu SP
4	Kabupaten Maros	3,260	3	Validasi Perwakilan
5	Kabupaten Luwu	3,226	3	Validasi Perwakilan
6	Kabupaten Luwu Utara	3,222	3	Validasi Perwakilan
7	Kabupaten Bantaeng	3,217	3	Validasi Perwakilan
8	Kabupaten Sidrap	3,188	3	Validasi Perwakilan
9	Kabupaten Pinrang	3,187	3	Validasi Perwakilan
10	Kota Palopo	3,138	3	Validasi Perwakilan
11	Kabupaten Gowa	3,109	3	Validasi Perwakilan
12	Kabupaten Soppeng	3,100	3	Evaluasi Perwakilan
13	Kabupaten Bone	3,086	3	Validasi Perwakilan
14	Kabupaten Luwu Timur	3,031	3	Validasi Perwakilan
15	Kabupaten Bulukumba	3,025	3	Validasi Perwakilan
16	Kabupaten Kep. Selayar	3,002	3	Validasi Perwakilan
17	Kabupaten Wajo	3,001	3	Validasi Perwakilan



Jumlah kab/kota dengan level maturitas SPIP \geq Level 3 tahun 2020-2022 mengalami peningkatan persentase capaian yakni 81,25%, 93,33%, dan 106,25%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024, jumlah kab/kota yang terealisasi baru mencapai

80,95%. Masih terdapat tujuh pemerintah daerah yang belum mencapai maturitas SPIP level 3, yakni Kabupaten Barru, Enrekang, Toraja Utara, Pangkajene dan Kepulauan, Takalar, Jeneponto, dan Tana Toraja.

Hambatan belum tercapainya target maturitas penyelenggaraan SPIP antara lain:

- 1) Pemerintah daerah belum menetapkan SPIP sebagai Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD;
- 2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah belum baik;
- 3) Keterbatasan anggaran pembinaan, terdapat pengurangan jumlah anggaran Perwakilan BPKP diperuntukan untuk mendukung penanganan Covid 19;
- 4) Kurangnya dukungan pimpinan pemerintah daerah terkait dengan peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memahami MR dan SPIP dan Kegiatan Manajemen Risiko belum dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Tantangan atas capaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dalam menuju Level 3 disebabkan belum terpenuhinya parameter level 3 per subunsur (terdapat AOI pada beberapa subunsur). Berdasarkan hasil analisis, secara umum komponen struktur dan proses dan komponen pencapaian tujuan memiliki skor rendah pada rata-rata pemerintah daerah. Selain itu terdapat beberapa subunsur yang memiliki skor rendah pada rata-rata pemerintah daerah, yaitu:

- 1) Identifikasi Risiko
- 2) Analisis Risiko

Rendahnya skor subunsur tersebut disebabkan oleh:

- 1) Pemerintah daerah belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko;

- 2) Belum adanya kebijakan yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan pengelolaan dan penilaian risiko secara terstruktur;
- 3) Nilai SAKIP pemerintah daerah di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan rata-rata B;
- 4) Pengamanan Aset secara fisik masih belum baik.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dengan melakukan bimbingan teknis, sosialisasi dan *coaching clinic*.
- 2) Peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan PPM.

IKU 5-5: Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3

Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3 Tahun 2022 sebanyak 1 Provinsi

Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3 adalah jumlah pemerintah provinsi yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq level 3.

Jumlah provinsi dengan MRI \geq level 3 tahun 2022 adalah sebanyak 1 pemerintah daerah dari 0 (nol) target yang diberikan.

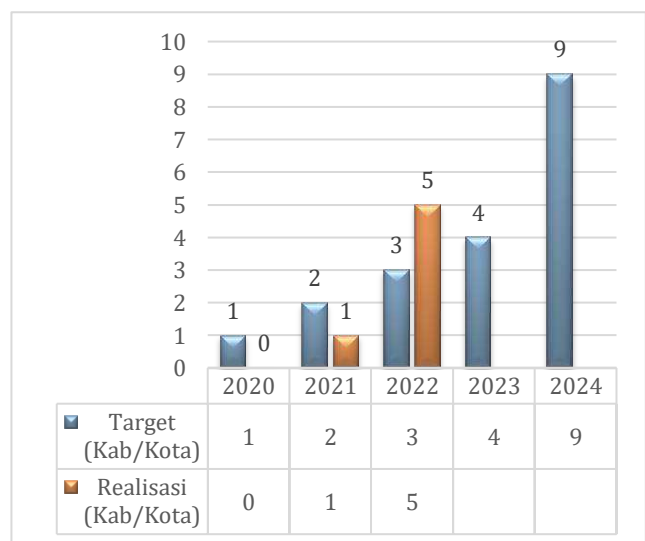
IKU 5-6: Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3

Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3 Tahun 2022 sebanyak 5 Kab/Kota

Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 adalah jumlah pemda kabupaten/kota yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq level 3.

Jumlah kabupaten/kota dengan MRI \geq level 3 tahun 2022 adalah sebanyak lima pemerintah daerah.

Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 tahun 2022 telah mencapai 166,67% atau lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 50% dan tahun 2020 sebesar 0%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024, jumlah kabupaten/kota yang terealisasi baru mencapai 55,56%.



Capaian tahun 2022 sebanyak lima pemerintah daerah berdasarkan:

1) Hasil ekspose tim panel atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Parepare dan Pemerintah Kabupaten Sinjai mendapatkan nilai MRI sebesar 3,063 dan 3,040 (menunggu SP).

2) Hasil validasi Perwakilan atas penilaian cepat SPIP

Rendahnya capaian tahun 2022, disebabkan sebagian besar Pemda belum melakukan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan:

1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dengan melakukan bimbingan teknis, sosialisasi dan *coaching clinic* penyusunan *3 layer risk register* (strategis Pemda, strategis OPD, dan operasional).

2) Peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan PPM.

IKK 5-7: Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah

Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel Tahun 2022 sebanyak 80 pemerintah desa

IKK “Jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah” menunjukkan persentase jumlah pemda yang akuntabel (efisien dan efektif) dalam pengelolaan keuangan dan kinerja dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB.

IKK “Jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah” diukur dengan menghitung jumlah pemda dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB dibandingkan dengan jumlah pemda di Provinsi Sulawesi Selatan dikalikan dengan 100%.

Jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 adalah sebanyak 0 pemda atau mencapai 0%.

IKK 5-8: Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel

Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel Tahun 2022 sebanyak 80 pemerintah desa

Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel adalah jumlah desa yang telah taat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai ketentuan.

Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel tahun 2022 adalah sebanyak 80 (delapan puluh) pemerintah desa. Jumlah desa yang menjadi objek

pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 adalah sebanyak 80 (delapan puluh) desa yang dilaksanakan pada empat triwulan di empat kabupaten sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Bone sebanyak sepuluh desa triwulan 1
- 2) Kabupaten Luwu sebanyak sepuluh desa triwulan 1
- 3) Kabupaten Toraja Utara sebanyak 30 (tiga puluh) desa triwulan 2- 4
- 4) Kabupaten Maros sebanyak 30 (tiga puluh) desa triwulan 2-4

Capaian kinerja IKU Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel tahun 2022 adalah sebesar 400% dari target 20 (dua puluh) desa.

IKK 5-9: Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai

Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai Tahun 2022 sebanyak 20 (dua puluh) pemerintah desa

Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai adalah jumlah desa yang telah taat dalam mengelola aset desa sesuai ketentuan. Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai tahun 2022 adalah sebanyak 20 (dua puluh)

pemerintah desa.

Jumlah desa yang menjadi objek pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 adalah sebanyak 20 (dua puluh) desa yang dilaksanakan pada triwulan 1 tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Bone sebanyak sepuluh desa triwulan 1
- 2) Kabupaten Luwu sebanyak sepuluh desa triwulan 1

Capaian kinerja IKU Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target 20 desa.

IKK 5-10: Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3

Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3 Tahun 2022 sebanyak **0 BUMN**

Badan usaha dengan MRI baik tercapai apabila aktivitas manajemen organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan. Indikator ini diukur dengan menggunakan BUMN yang berada pada maturitas MR Level 3 dibagi dengan jumlah total BUMN.

Pada tahun 2022, tidak terdapat target dan realisasi BUMN dengan MRI \geq Level 3.

IKK 5-11: Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3

Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3 Tahun 2022 sebanyak **5 Kab/Kota**

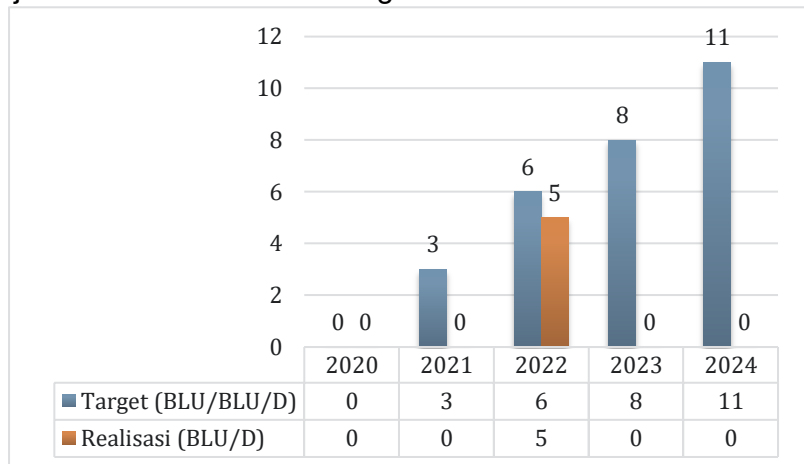
Badan usaha dengan MRI baik tercapai apabila aktivitas manajemen organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan. Indikator ini diukur dengan menggunakan BLU/BLUD yang berada pada maturitas MR Level 3 dibagi dengan jumlah total BLU/BLUD.

Jumlah BLU/BLUD dengan MRI \geq Level 3 berdasarkan hasil *mapping* yang dilakukan adalah sebanyak lima BLU/BLUD dari target tahun 2022 sebanyak enam BLU/BLUD atau 83,33% dari target sebesar 100%. Dengan ringkasan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No	Nama BLU/D	Skor	Predikat
1.	Politeknik Penerbangan Makassar	100	3
2.	RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Provinsi Sulawesi Selatan	100	3
3.	RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng	97,73	3
4.	SMK BLUD Negeri 3 Luwu	90,91	3
5.	RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu	86,36	3

Perkembangan realisasi jumlah BLU/BLUD dengan MRI \geq Level 3 dan perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut.

Mapping dilakukan berdasarkan pengisian kuesioner terkait



penerapan manajemen risiko yang kemudian hasilnya diolah oleh Direktorat Pengawasan BLU, BLUD, Badan Usaha Jasa Air, BUMD dan BUMDes. Tidak tercapainya kinerja disebabkan karena proses penerapan MR pada BLUD di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan masih dalam tahap sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan *risk register* serta RSUD BLUD masih dalam proses membangun infrastruktur MR. Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk meningkatkan capaian pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

- 1) Pemetaan dokumen persiapan penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko;
- 2) Mapping penerapan manajemen risiko pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 28 (dua puluh delapan) RSUD di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 3) Bimbingan teknis manajemen risiko dan penyusunan Register Risiko.

2.6

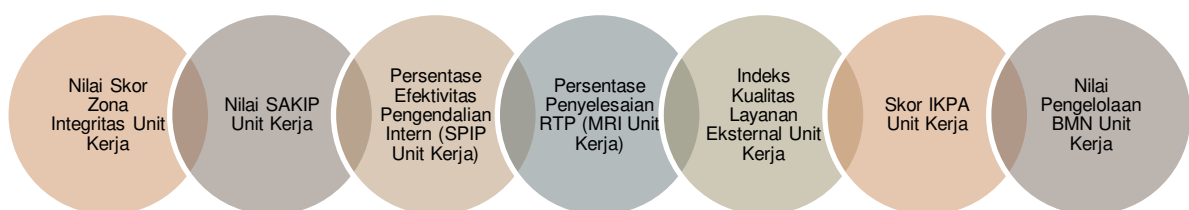
Sasaran Kegiatan 6: Meningkatkan Kualitas Layanan “Ketatausahaan” Unit Kerja



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	76,30	101,73%	★
6.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	84,90	103,54%	★

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
6.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	95,89	136,99%	★
6.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	100	100,00%	★
6.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	93,15	124,20%	★
6.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95	96,28	101,35%	★
6.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80	97,02	121,28%	★

Pencapaian sasaran kegiatan 6: Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja diukur dengan menggunakan tujuh indikator kinerja yaitu:



Uraian kinerja atas sasaran kegiatan: Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja adalah sebagai berikut:

IKK 6-1: Skor Zona Integritas Unit Kerja

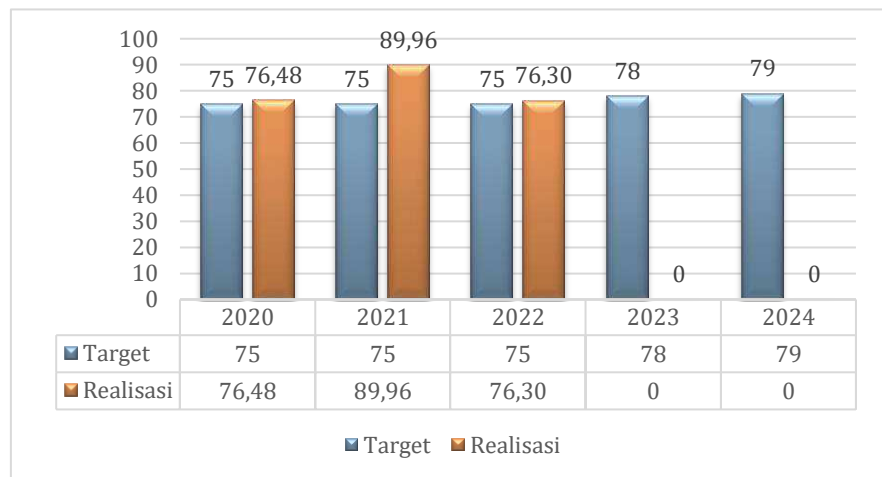
Skor Zona Integritas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 adalah 76,30 atau mencapai 101,73% dari target

IKU nilai skor zona integritas unit kerja diukur dengan hasil penilaian mandiri skor zona integritas, sesuai dengan kertas kerja penilaian mandiri pembangunan zona integritas yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 10 Tahun 2019. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Revisi target kinerja ini pada tahun 2022 adalah 75 dari Skor Skala 100. Pada Tahun 2022, nilai skor zona integritas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah 76,30 atau mencapai 101,73% dari target 2022. Nilai Skor Zona Integritas didapatkan dari total nilai komponen pengungkit dan komponen hasil penilaian mandiri zona integritas.

Perkembangan realisasi nilai skor zona integritas unit kerja dan perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target 2020-2024 disajikan dalam grafik.



IKK 6-2: Nilai SAKIP Unit Kerja

Nilai SAKIP Unit Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah 84,90 (kategori 'A' dengan predikat memuaskan)

IKU nilai SAKIP unit kerja diukur dengan menghitung Nilai SAKIP unit kerja sesuai hasil evaluasi dari Inspektorat, atau minimal hasil penilaian mandiri unit kerja. Indikator ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan revisi target, pada tahun 2022 target kinerja ini adalah 82 dari skor skala 100.

Pada tahun 2022, nilai SAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah 84,90 atau mencapai 103,54% dari target 2022. Nilai SAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi merupakan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat BPKP.



IKK 6-3: Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit Kerja)

Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan) Tahun 2022 adalah 95,89%

IKU Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit Kerja) diukur dengan menghitung (jumlah pengendalian existing yang efektif ditambah jumlah RTP yang selesai dan efektif) dibagi (jumlah seluruh pengendalian existing ditambah jumlah RTP yang telah selesai) dikali 100%.

Pada tahun 2022, persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan) adalah 95,89% atau mencapai 136,99% dari target 2022 sebesar 70%. Di perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 46 pernyataan risiko, 2 risiko berada diatas selera risiko dan seluruhnya telah dibuat serta diselesaikan RTP-nya.

IKK 6-4: Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)

Persentase penyelesaian RTP (MR Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan) Tahun 2022 adalah 100%

IKU persentase penyelesaian RTP (MR Unit Kerja) diukur dengan menghitung jumlah RTP yang diselesaikan dibagi jumlah RTP dikalikan dengan 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur

persentase penyelesaian RTP yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Target kinerja ini pada tahun 2022 adalah 100%.

Pada tahun 2022, persentase penyelesaian RTP (MR Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan) adalah 100% atau mencapai 100% dari target 2022. Di perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 46 pernyataan risiko, 2 risiko berada diatas selera risiko dan seluruhnya telah dibuat serta diselesaikan RTP-nya.

IKK 6-5: Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja

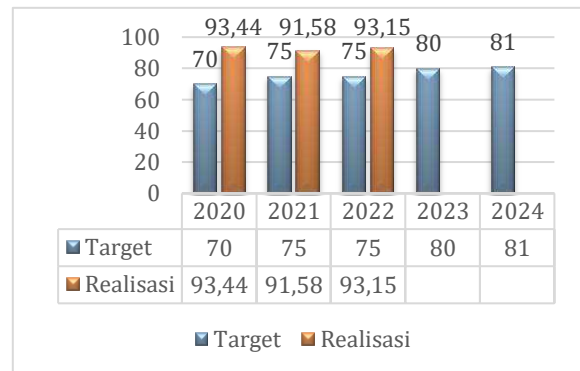
Kualitas Layanan Eksternal Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah 93,15%

IKU "indeks kepuasan layanan unit kerja" diukur dari rata-rata hasil penilaian tiap variable dalam survei reputasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator ini digunakan untuk menilai reputasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan oleh para pemangku kepentingan. Revisi target kinerja ini pada tahun 2022

adalah 75 dari indeks skala 100.

Pada tahun 2022, indeks kualitas layanan unit kerja adalah 93,15 atau mencapai 124,20% dari target 2022. Indeks kepuasan layanan unit kerja diukur melalui survei layanan perwakilan oleh 189 (seratus delapan puluh sembilan) responden yang merupakan *stakeholders* Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Perkembangan realisasi indeks kualitas layanan eksternal Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020, 2021 dan 2022 dengan target renstra tahun 2020 – 2024 disajikan pada grafik.

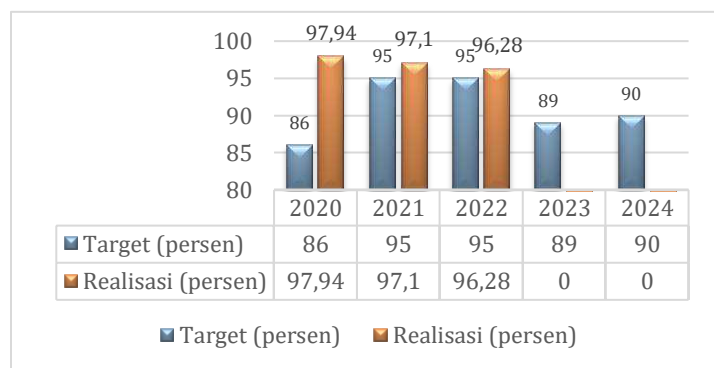


IKK 6-6: Skor IKPA Unit Kerja

Capain skor IKPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah 96,28

IKU “Skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA Unit Kerja” diukur dari hasil penilaian IKPA oleh Kementerian Keuangan. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kelancaran pelaksanaan anggaran, dukungan manajemen kas dan laporan keuangan. Target kinerja untuk Skor IKPA unit kerja di tahun 2022 yang ada pada Renstra adalah 88% namun telah dilakukan revisi menjadi 95% dari skor skala 100.

Pada tahun 2022, skor IKPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan bulan November 2022 adalah 96,28 atau mencapai 101,35% dari target tahun 2022. Skor tersebut didapatkan



dari hasil penilaian Kementerian Keuangan yang ditampilkan dalam aplikasi OM-SPAN. Sampai dengan laporan ini disusun, hasil penilaian IKPA bulan Desember tahun 2022 belum dirilis. Perkembangan realisasi skor IKPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 dan 2022 dengan target tahun 2020 – 2024 disajikan pada grafik.

IKK 6-7: Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

*Nilai Pengelolaan
BMN Unit Kerja
Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2022
memperoleh skor
97,02 dengan
predikat memuaskan.*

IKU Nilai Pengelolaan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan diukur dengan menggunakan form penilaian pengelolaan BMN dimana penilaian dilakukan secara *self assessment* dan divalidasi oleh Biro Umum. Indikator ini digunakan untuk memacu meningkatkan pengelolaan BMN menjadi lebih baik. Target kinerja ini pada tahun 2022 adalah memperoleh

predikat baik untuk pengelolaan BMN.

Pada Tahun 2022, berdasarkan hasil *self assessment* yang telah divalidasi oleh Biro Umum BPKP, nilai pengelolaan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh skor 97,02 dan memperoleh **predikat memuaskan** atau 121,28% dari target sebesar 80.

1. Kinerja Lain

a. Pengawasan Penanganan Covid-19

Pandemi Covid-19 yang telah terjadi selama kurang lebih tiga tahun sejak awal tahun 2020, menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bagi Indonesia khususnya dan dunia umumnya. Kondisi ini merupakan kondisi darurat yang memerlukan penanganan dengan segera. Berdasarkan Surat Keputusan



Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 1 Tahun 2020, BPKP memiliki tugas sebagai koordinator pengawasan akuntabilitas penanganan pandemi Covid-19. Untuk mengawal percepatan pemulihan ekonomi di daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengawasan berdasarkan agenda prioritas pengawasan dan agenda prioritas pengawasan daerah tahun 2022. Kegiatan pengawasan yang telah dilakukan antara lain Penanganan Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional, Akuntabilitas Keuangan Daerah, Pengawasan pada Bidang Pendidikan, Pengawasan pada Bidang Kesehatan, Pengawasan atas Penanganan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Pembangunan Infrastruktur.

1) Penanganan Covid-19

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terkait penanganan Covid-19, antara lain:

- a) Monitoring dan Analisis atas Pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah (PC-PEN) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b) Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan Bersumber Dana APBD pada Kabupaten Gowa;
- c) Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan Bersumber Dana APBD Triwulan II pada Pemerintah Kota Makassar;

- d) Monitoring dan Analisis atas Pemanfaatan APBD untuk Penanganan *Covid-19* dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah (PC-PEN) Triwulan II di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - e) Monitoring dan Analisis atas Pemanfaatan APBD untuk Penanganan *Covid-19* dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah (PC-PEN) Triwulan III di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - f) Monitoring dan Analisis atas pemanfaatan APBD untuk penanganan *Covid-19* dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah (PC-PEN) Triwulan III pada Pemerintah Kabupaten Soppeng;
 - g) Audit Tujuan Tertentu (ATT) PBJ Almatkes dan obat-obatan penanganan *Covid-19* Triwulan III Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
 - h) Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Penanganan *Covid-19* Bidang Kesehatan Bersumber Dana APBD Triwulan IV pada Pemerintah Kota Makassar;
 - i) Monitoring dan Analisis atas Pemanfaatan APBD untuk Penanganan *Covid-19* dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah (PC-PEN) Triwulan IV pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - j) Monitoring dan Analisis atas Pemanfaatan APBD untuk Penanganan *Covid-19* dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah (PC-PEN) Triwulan IV di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
- 2) Akuntabilitas Kinerja Daerah
- Kegiatan pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terkait akuntabilitas kinerja daerah berupa:
- a) Bimbingan Teknis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa;
 - b) Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa.
- 3) Pengawasan pada Bidang Pendidikan
- Kegiatan pengawasan bidang pendidikan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan antara lain sebagai berikut:
- a) Monitoring penggunaan dana transfer dan pemenuhan belanja fungsi pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b) Evaluasi penggunaan dana transfer pada sektor pendidikan menengah Provinsi Sulawesi Selatan;

- c) Evaluasi penggunaan dana transfer pada sektor pendidikan dasar Kabupaten Maros;
 - d) Reviu pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas satuan pendidikan yang bersumber dari DAK program pengelolaan pendidikan Kota Palopo
- 4) Pengawasan pada Bidang Kesehatan
- Kegiatan Pengawasan bidang kesehatan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan antara lain sebagai berikut:
- a) Audit tujuan tertentu pengadaan barang/jasa pemerintah untuk penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan Bersumber Dana APBD pada Kabupaten Gowa;
 - b) Audit tujuan tertentu pengadaan barang/jasa pemerintah untuk penanganan Covid-19 bidang kesehatan bersumber dana APBD Triwulan II pada Pemerintah Kota Makassar;
 - c) Audit tujuan tertentu pengadaan barang/jasa pemerintah untuk penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan Bersumber Dana APBD Triwulan IV pada Pemerintah Kota Makassar
- 5) Pengawasan atas Penanganan Jaring Pengaman Sosial (JPS)
- Kegiatan pengawasan bidang kesehatan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah evaluasi atas implementasi perlindungan sosial bersumber dana APBD pada Pemerintah Kab. Pangkep;
- 6) Pengawasan atas Penanganan Jaring Pengaman Sosial (JPS)
- Kegiatan pengawasan atas penanganan jaring pengaman sosial (JPS) yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan antara lain sebagai berikut:
- a) Evaluasi infrastruktur Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah tahun 2021 dan 2022;
 - b) Evaluasi pengembangan infrastruktur Pelabuhan Perikanan bersumber Dana APBD pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
 - c) Monitoring infrastruktur Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah tahun 2021 dan 2022

b. Penyelenggaraan Diklat

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai Kantor Pengelola Diklat sejak tahun 2014 bertugas untuk menyelenggarakan diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan diklat teknis substansi bertempat di gedung diklat kantor pengelola diklat BPKP Sulawesi



Selatan. Diklat yang diadakan sesuai dengan kalender diklat yang ditetapkan oleh Pusdiklatwas BPKP dan diklat mandiri permintaan pemerintah daerah dan instansi vertikal.

1) Dasar Penyelenggaraan

Dasar penyelenggaraan Diklat Pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- a) Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-637/K/SU/2013 tanggal 30 Agustus 2013 Tentang Kantor Pengelola Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP di Makassar.
- b) Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Diklat Kantor Pengelola Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan di Makassar Nomor BAST-188/PW21/1/2014.

2) Tenaga Pengajar dan Panitia Diklat

Tenaga Pengajar sebagian berasal dari Pejabat Struktural/Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh panitia diklat adalah pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

3) Realisasi Diklat Tahun 2022

Realisasi penyelenggaraan diklat selama tahun 2022 pada Kantor Pengelola diklat BPKP Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Diklat	Jumlah Kelas
1	Diklat Jabatan Fungsional Auditor	6
2	Diklat Teknis Substantif	18
3	Diklat Mandiri Teknis Substantif	0
Total		24

2. Penghargaan/Apresiasi Instansi Lain

Penghargaan yang diterima Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 adalah:

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun	Uraian Ringkas Penghargaan
1.	-	Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan	2022	Asistensi dalam Penerapan Manajemen Risiko di BPS se-Provinsi Sulawesi Selatan

3. Perbaikan SAKIP Tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai 84,90 dengan predikat Memuaskan (A). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*) sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi, upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 antara lain:

- 1) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang melibatkan seluruh pegawai;
- 2) Melakukan reviu atas Renstra yang menjadi acuan perwakilan secara berkala;
- 3) Menyusun Rencana Aksi atas Kinerja tahun 2022.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar Rp37.069.033.783,00 atau terserap 98,80% dari target sebesar Rp37.516.229.000,00. Rincian serapan anggaran tahun 2022 per jenis belanja dan per program dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2022 menurut Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	24.752.393.000	24.356.901.972	98.40
2	Belanja Barang	11.307.080.000	11.260.611.911	99.58
3	Belanja Modal	1.456.756.000	1.451.519.900	99.64
Jumlah		37.516.229.000	37.069.033.783	98.80

2. Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2022 Menurut Program/Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	654.050.000	652.391.396	99.74

No	Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	5.481.620.000	5.458.858.838	99.58
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	46.610.000	46.217.689	99.15
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	44.640.000	44.637.500	99.99
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	750.809.000	749.398.855	99.81
6	Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut	70.411.000	70.063.424	99.50
7	Hasil Pengawasan Pengembangan JFA	38.190.000	37.859.500	99.13
8	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	30.429.899.000	30.099.606.581	99.99
Jumlah		37.516.229.000	37.069.033.783	98.80

3. Anggaran dan realisasi keuangan tahun 2022 menurut sasaran kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	1 Layanan		
	Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP	445.945.000	422.504.453	94.74
II	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaran SPIP	1 Layanan		
	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaran SPIP	79.675.000	79.089.108	99.26
Jumlah Total		525.620.000	501.593.561	95.42

BAB IV PENUTUP

Sesuai mandat yang diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam rangka pelaksanaan amanah tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tersebut mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) BPKP 2020 – 2024 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

A. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis dengan menggunakan sistem aplikasi antara lain aplikasi DMS, SIMA, dan E-SAKIP. Sedangkan format disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan diukur dengan membandingkan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi selama Tahun 2022 dengan menggunakan rumus yang sesuai dengan masing-masing indikator kinerja yang mendukung program yang dilaksanakan selama Tahun 2022.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, indikator sasaran program sebanyak enam sasaran dengan sasaran kegiatan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) indikator, dengan hasil 29 (dua puluh sembilan) indikator dengan kategori kinerja **“Mencapai/Melampaui Target”**, tiga indikator dengan kategori kinerja **“Belum Mencapai Target”** dan lima indikator tidak ada penetapan target dari pusat.

Indikator kinerja dengan kategori “Mencapai/Melampaui Target” adalah:

1. Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi yaitu senilai Rp5.058.620.000,00 dari target senilai Rp2.221.000.000,00, sehingga capaiannya 227,76%.
2. Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah yaitu senilai Rp783.519.077.419,10 dari target senilai Rp760.379.000.000,00, sehingga capaiannya 103,04%.
3. Nilai penyelamatan keuangan Negara dan daerah yaitu senilai Rp59.890.866.958,32 dari target Rp1.300.000.000.000, sehingga capaiannya sebesar 4606,99%.
4. Jumlah proyek strategis nasional yang tercapai sesuai target yaitu sebanyak dua proyek dari target satu proyek strategis nasional, sehingga capaiannya sebesar 200,00%.
5. Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan adalah 100% dari target 85%, sehingga capaiannya sebesar 117,65%.
6. Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi sebanyak dua topik dari target dua topik APPD, sehingga capaiannya sebesar 100,00%.
7. Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik adalah satu BUMN dari target satu BUMN, sehingga capaiannya 100,00%.
8. Jumlah BUMD dengan kinerja sehat yaitu sebanyak 12 (dua belas) BUMD dari target 10 (sepuluh) BUMD, sehingga capaiannya sebesar 120,00%.
9. Jumlah BLUD dengan kinerja sehat yaitu sebanyak 4 BLUD dari target 4 BLUD, sehingga capaiannya sebesar 100,00%.
10. Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan sebanyak 55 BUMDes dari target 55 BUMDes, sehingga capaiannya sebesar 100,00%.
11. Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa sebanyak lima BUMDes dari target dua BUMDes, sehingga capaiannya sebesar 250,00%.
12. Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 sebanyak 3 BLU/D dari target 1 BLU/D, sehingga capaiannya sebesar 300,00%.
13. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sebanyak 69 penugasan dari total 69 penugasan represif atau mencapai 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100,00%.
14. Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sebanyak 14 rekomendasi dari 14 penugasan atau mencapai 100% dari target sebesar 80%, sehingga capaiannya sebesar 125,00%.

15. Jumlah Pemerintah Daerah menindak lanjuti Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK sebanyak 3 Pemda dari target sebesar 1 Pemda, sehingga capaiannya sebesar 300,00%.
16. Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 sebanyak 14 APIP dari target sebesar 13 APIP, sehingga capaiannya sebesar 107,69%.
17. Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sebanyak 1 Provinsi dari target 1 Provinsi, sehingga capaiannya sebesar 100,00%.
18. Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sebanyak 17 Kab/Kota dari target 16 Kab/Kota sehingga capaiannya sebesar 106,25%.
19. Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 1 Provinsi dari target 0 Provinsi.
20. Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 5 Kab/Kota dari target 3 Kab/Kota sehingga capaiannya sebesar 166,67%.
21. Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel sebanyak 80 Desa dari target 20 desa, sehingga capaiannya sebesar 400,00%
22. Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai sebanyak 20 Desa dari target 20 desa, sehingga capaiannya sebesar 100,00%.
23. Nilai skor zona integritas unit kerja yaitu 76,30 dari skor skala 100 dari target 75, sehingga capaiannya sebesar 101,73%.
24. Nilai SAKIP unit kerja yaitu 84,90 skor skala 100 dari target 82 skor skala 100, sehingga capaiannya sebesar 103,54%.
25. Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) pada tahun 2022 adalah 95,89% atau mencapai 136,99% dari target 2022 sebesar 70%
26. Persentase Penyelesaian RTP (MR Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan) terdapat 42 pernyataan risiko dan telah diselesaikan RTPnya sebanyak 42 atau 100% dari target 100% pada tahun 2022
27. Indeks kualitas layanan eksternal unit kerja adalah 93,15 indeks skala 100 dari target 75 indeks skala 100, sehingga capaiannya sebesar 124,20%.
28. Skor IKPA unit kerja (khusus unit kerja mandiri) yaitu 96,28 per November 2022 skor skala 100 dari target 95% skor skala 100, sehingga capaiannya sebesar 101,35%.
29. Nilai pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus unit kerja mandiri) yaitu 97,02% dari target 80%, sehingga capaiannya 121,28%.

Indikator kinerja dengan kategori “Belum Mencapai target” adalah:

1. Persentasi rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti adalah 73,17% dari target 80,00%, sehingga capaiannya sebesar 91,46%.
2. Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik, sampai dengan akhir tahun 2022 belum ada realisasi dari target tahun 2022 sebesar 3 Pemda.
3. Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 5 BLUD dari target 6 BLUD, sehingga capaiannya sebesar 83,33%.

Indikator kinerja dengan target nol dan sampai akhir tahun 2022 belum ada realisasi adalah:

1. Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik.
2. Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3.
3. Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3.
4. Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3.
5. Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.

B. UPAYA DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran program tersebut di atas belum merupakan capaian optimal dan memerlukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang dengan meningkatkan upaya-upaya kegiatan *assurance* dan *consulting*. Selain itu perlu juga diambil langkah-langkah perbaikan kegiatan pengawasan yang disesuaikan dengan mandat terbaru sehingga dapat menjawab tantangan yang dibebankan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun langkah konkrit yang dilakukan adalah:

1. Peningkatan opini BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah, opini BUMN/D serta opini wajar atas laporan dukungan PHLN dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Pendampingan penyusunan laporan keuangan dan pendampingan reviu laporan keuangan Pemda bersama Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - c. Pendampingan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).
 - d. Peningkatan kapasitas SDM pada Pemerintah Daerah.
 - e. Pembenahan sistem dan tata kelola, sistem akuntansi, manajemen aset, asistensi penyusunan laporan keuangan maupun *Good Corporate Governance* (GCG).

- f. Kegiatan audit, evaluasi, dan reviu diarahkan kepada kesesuaian penyelenggaraan *risk management, control, dan governance process* dengan kualitas yang digariskan dengan kebijakan manajemen, standar, atau norma yang diberlakukan untuk praktik yang sehat.
2. Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good public governance*) dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan Capaian Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - b. Mendorong seluruh BUMN/D dan BLUD yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerapkan kriteria GCG dengan pembinaan pada BUMN/BUMD serta BLUD melalui kegiatan evaluasi/pengembangan sistem pengelolaan dan bimtek/konsultasi/sosialisasi/asistensi/pendampingan penerapan GCG.
 3. Mewujudkan iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Pre-emptif dan Preventif pada implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta sistem pencegahan KKN (*Fraud Control Plan*) di semua SKPD di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Peningkatan komunikasi dengan instansi penegak hukum terkait dengan permintaan audit investigasi maupun PKKN.
 - c. Melakukan sosialisasi tentang produk-produk Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dimanfaatkan *stakeholders* sesuai dengan mandat yang ada, diantaranya Evaluasi kinerja PDAM/PERUMDAM, eskalasi harga, FCP, GCG, SIA BLUD, SIA PDAM, Billing System PDAM serta aplikasi SIM-HP.
 - d. Melakukan penilaian maturitas SPIP sebagai wujud pengujian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
 4. Peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten melalui kegiatan sosialisasi JFA dan tata kelola APIP, sehingga seluruh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditingkatkan level *Internal Audit Capability Model* (IACM).
 5. Pembentukan klinik BLUD dan PDAM di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Peningkatan kompetensi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melalui PPM, *workshop* dan diklat.
7. Peningkatan efektivitas internal *quality assurance* melalui FGD hasil pengawasan.

Sebagai akhir kata, kiranya Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam menilai kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran BPKP di daerah untuk memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

LAMPIRAN

**KINERJA OUTCOME TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN**

No	Sastra/ Saspro/ Saskeg	IKU/IKP/IKK	Kinerja Tahun 2022				Keuangan Tahun 2022 (Rp)			SDM Tahun 2022 (OH)		
			Satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	Rp (Juta)	2.221	5.058,62	227,76						
		Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rp (Juta)	760.379	783.519,08	103,04						
		Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rp (Juta)	1.300,00	59.890,87	4.606,99						
Capaian rata-rata						1.645,93	654.050.000,00	652.391.396,00	99,75	4.660	4.606	98,84
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1	2	200,00						
		Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85	100	117,65						
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Topik APPD	2	2	100,00						
		Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80	73,17	91,46						
Capaian rata-rata						127,28	4.481.620.000,00	4.458.858.838,00	99,49	10.425	9.627	92,35
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	Jumlah BUMN dengan pengelolaan kpengelolaan korporasinya baik	BUMN	1	1	100,00						
		Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat	BUMD	10	12	120,00						
		Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat	BLUD	4	4	100,00						
		Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan	BUMdes	55	55	100,00						
		Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMdes	2	5	250,00						
		Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	0	0	-						
		Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI > Level 3	BUMD	0	0	-						
		Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI > Level 3	BLU/D	1	3	300,00						
Capaian rata-rata						121,25	546.610.000,00	546.217.689,00	99,93	1.213	1.034	85,24
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00						
		Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	80	100	125,00						
		Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Pemda	3	0	-						
		Jumlah Pemda menindak lanjuti Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1	3	300,00						
Capaian rata-rata						131,25	544.640.000,00	544.637.500,00	100,00	2.112	2.061	97,59

No	Sastra/ Saspro/ Saskeg	IKU/IKP/IKK	Kinerja Tahun 2022				Keuangan Tahun 2022 (Rp)			SDM Tahun 2022 (OH)		
			Satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	Jumlah APIP Provins dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Provinsi	0	0	-						
		Jumlah APIP Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	13	14	107,69						
		Jumlah Pemprov dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Provinsi	1	1	100,00						
		Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	16	17	106,25						
		Jumlah Provins dengan MRI \geq Level 3	Provinsi	0	1	100,00						
		Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	2	1	50,00						
		Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	0	0	-						
		Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Deaa	20	80	400,00						
		Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Deaa	12	12	100,00						
		Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	0	0	-						
Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	6	5	83,33								
Capaian rata-rata						95,21	859.410.000,00	857.321.779,00	99,76	3.983	3.696	92,79
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	76,3	101,73						
		Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	84,9	103,54						
		Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	95,89	136,99						
		Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)	Persen	100	100	100,00						
		Indeks Kualias Layanan Eksenal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	93,15	124,20						
		Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	95	96,28	101,35						
		Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Kategori	80	97,02	121,28						
		Capaian rata-rata										

**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN TAHUN 2021
 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Sasaran Strategis (Sastra)	Indikator Kinerja Utama (IKU)		IKU Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan									
			Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Naik (turun)	Capaian 2022	Capaian 2021	Naik (turun)	Target 2024	% realisasi dari tahun 2024	
1 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	Rp (Juta)	5.058,62	28.533	- 23.474	-	82,27	831,31	-913,58	2.021	250,30
	1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rp (Juta)	783.519,08	94.299	689.220	730,89	48,18	682,70	112.900	693,99	
	1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rp (Juta)	59.890,87	50.244	9.647	19,20	149,20	-130,00	51.982	115,21	
2 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	2	1	1	200,00	100	100,00	1	200,00	
	2.2	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	100	0	100	117,65	0	117,65	85	117,65	
	2.3	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Topik APPD	2	0	2	100,00	0	100,00	0	0,00	
	2.4	Persentasi rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	73,17	0	73,17	91,46	0	91,46	0	0,00	
3 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	3.1	Jumlah BUMN dengan pengelolaan kpengelolaan korporasinya baik	BUMN	1	0	1	100,00	100,00	0,00	11	9,09	
	3.2	Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat	BUMD	12	9	3	120,00	100,00	20,00	11	109,09	
	3.3	Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat	BLUD	4	1	3	100,00	50,00	50,00	4	100,00	
	3.4	Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan	BUMdes	55	32	23	100,00	128,00	-28,00	77	71,43	
	3.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMdes	5	0	5	250,00	0,00	250,00	0	0,00	
	3.6	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	3.7	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI > Level 3	BUMD	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	3.8	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI > Level 3	BLU/D	3	0	3	300,00	0,00	300,00	0	0,00	
4 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100	100	0	100,00	100,00	0,00	100	100,00	
	4.2	Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100	100	0	125,00	133,33	-8,33	90	111,11	
	4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Pemda	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	4.4	Jumlah Pemda menindak lanjuti Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Pemda	3	1	2	300,00	100,00	200,00	0	0,00	

Sasaran Strategis (Sastra)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan									
		Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Naik (turun)	Capaian 2022	Capaian 2021	Naik (turun)	Target 2024	% realisasi dari tahun 2024	
5 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	5.1 Jumlah APIP PProvinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Provinsi	0	0	0	0	0	0	1	0,00	
	5.2 Jumlah APIP Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	14	15	-	1	107,69	125,00	-17,31	21	66,67
	5.3 Jumlah Pemprov dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Provinsi	1	1	0	100,00	100,00	0,00	1	100,00	
	5.4 Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	17	14	3	106,25	93,33	12,92	21	80,95	
	5.5 Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Provinsi	1	0	1	0	50,00	-50,00	9	11,11	
	5.6 Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	1	1	0	50,00	50,00	0,00	9	11,11	
	5.7 Jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	0	0	0	0	0,00	0,00	1	0,00	
	5.8 Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Deaa	80	0	80	400,00	249,72	150,28	1240	6,45	
	5.9 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Deaa	12	12	0	100,00	100,00	0,00	506	2,37	
	5.10 Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	0	0	0	0	0,00	0,00	11	0,00	
	5.11 Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	5	0	5	83,33	0,00	83,33	11	45,45	
6 Meningkatkan Tata Kelola Unit Kerja	6.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	76,3	89,96	-	14	101,73	119,95	-18,21	79	96,58
	6.2 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	84,9	82,71	2,19	103,54	103,39	0,15	84	101,07	
	6.3 Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	95,89	100	-	4	136,99	153,85	-16,86	0	0,00
	6.4 Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)	Persen	100	100	0	100,00	100,00	0,00	0	0,00	
	6.5 Indeks Kualias Layanan Eksenal Unit Kerja	Indeks Skala 100	93,15	91,58	2	124,20	122,11	2,09	81	115,00	
	6.6 Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	96,28	97,10	-	1	101,35	102,21	-0,86	90	106,98
	6.7 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Kategori	97,02	88	9	121,28	110,00	11,28	100	97,02	

**TARGET DAN REALISASI OUTPUT TAHUN 2022
 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Sasaran Strategis (Sastra)	Rerata Capaian Sastra	Rincian Output (RO)	Kinerja RO				Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM	
			Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisiensi (7≥10)	Belum Efisien (7<10)	Efisiensi (7≥13)	Belum Efisien (7<13)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10=9/8	11	12	13=12/11	14	15	16	17
1 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.645,93	Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi	PP	2	2	100,00%	29.447.000	29.300.000	99,50%	90	90	100,00%	V	-	V	-
		Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	PP	54	54	100,00%	476.785.000	474.415.532	99,50%	4.371	4.346	99,43%	V	-	V	-
		Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah - Pelaksanaan Pengawasan	PP	3	3	100,00%	58.828.000	58.535.000	99,50%	199	170	85,43%	V	-	V	-
2 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	127,28	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	PP	239	239	100,00%	3.665.664.000	3.644.165.507	99,41%	9749	8995	92,27%	V	-	V	-
		Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	PP	13	13	100,00%	1.298.171.000	1.296.941.500	99,91%	676	632	93,49%	V	-	V	-
3 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	121,25	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	PP	32	32	100,00%	375.415.000	373.548.795	99,50%	1.213	1.034	85,24%	V	-	V	-
4 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	131,25	Rekomendasi hasil pengawasan pengendalian korupsi	PP	73	73	100,00%	456.633.000	454.361.048	99,50%	2.112	2.061	97,59%	V	-	V	-
5 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	95,21	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	PP	17	17	100,00%	114.091.000	113.524.000	99,50%	634	422	66,56%	V	-	V	-
		Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	PP	63	63	100,00%	455.107.000	452.844.856	99,50%	2.163	2.091	96,67%	V	-	V	-
		Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA	PP	5	5	100,00%	35.100.000	33.759.500	96,18%	186	170	91,40%	V	-	V	-
		Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut	PP	7	7	100,00%	70.411.000	70.063.424	99,51%	199	183	91,96%	V	-	V	-
6 Meningkatkan Tata Kelola Unit Kerja	112,73	Layanan Umum/Dukman Perwakilan BPKP	Layanan	1	1	100,00%	531.620.000	530.203.561	99,73%	530	530	100,00%	V	-	V	-
		Layanan Perkantoran Perwakilan BPKP	Layanan	1	1	100,00%	28.437.723.000	28.033.461.591	98,58%	1080	1080	100,00%	V	-	V	-
		Layanan Sarana Perwakilan BPKP	Unit	85	85	100,00%	764.126.000	759.361.000	99,38%	344	310	90,12%	V	-	V	-
		Layanan Prasarana Perwakilan BPKP	Unit	12	12	100,00%	696.430.000	695.916.000	99,93%	200	200	100,00%	V	-	V	-

**PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK) TAHUN 2022
 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Sasaran Strategis (Sastra)	Rincian Output (RO)	Kinerja RO							
		Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Naik (turun) Realisasi	% capaian 2022	% capaian 2021	% Naik (turun) Capaian	
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi	LHP	2	2	-	100,00%	100,00%	-
		Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	LHP	54	42	12	100,00%	100,00%	-
		Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah - Pelaksanaan Pengawasan	LHP	3	3	-	100,00%	100,00%	-
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	LHP	239	214	25	100,00%	100,00%	-
		Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	LHP	13	8	5	100,00%	100,00%	-
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	LHP	32	36	- 4	100,00%	100,00%	-
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Rekomendasi hasil pengawasan pengendalian korupsi	LHP	73	59	14	100,00%	100,00%	-
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Permda/BU	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	LHP	17	17	-	100,00%	100,00%	-
		Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	LHP	63	55	8	100,00%	100,00%	-
		Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA	LHP	5	5	-	100,00%	100,00%	-
		Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	LHP	7	8	- 1	100,00%	100,00%	-
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	Layanan Umum/Dukman Perwakilan BPKP	Layanan	1	1	-	100,00%	100,00%	-
		Layanan Perkantoran Perwakilan BPKP	Layanan	1	1	-	100,00%	100,00%	-
		Layanan Sarana Perwakilan BPKP	Unit	85	58	27	88,89%	88,89%	-
		Layanan Prasarana Perwakilan BPKP	Unit	12	2	10	100,00%	100,00%	-

**MATURITAS SPIP, KAPABILITAS APIP, MRI DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI PEMDA MITRA KERJA
 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN**

No	Nama Provinsi	SPIP			Kapabilitas APIP			MR			IEPK		
		Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Provinsi Sulawesi Selatan	3,103	3	Terdefinisi	2,22	2	Structured	2,925	2	Berkembang	2,910	2	Berkembang
2	Kota Palopo	3,138	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,825	2	Berkembang	2,910	2	Berkembang
3	Kabupaten Bantaeng	3,217	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,775	2	Berkembang	2,766	2	Berkembang
4	Kabupaten Bulukumba	3,025	3	Terdefinisi	2,52	2	Structured	3,000	3	Terdefinisi	2,910	2	Berkembang
5	Kabupaten Gowa	3,109	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,919	2	Berkembang	2,574	2	Berkembang
6	Kabupaten Jeneponto	2,712	2	Berkembang	2,04	2	Structured	2,200	2	Berkembang	2,604	2	Berkembang
7	Kabupaten Kep. Selayar	3,002	3	Terdefinisi	2,11	2	Structured	2,850	2	Berkembang	2,766	2	Berkembang
8	Kabupaten Luwu	3,226	3	Terdefinisi	2,62	2	Structured	2,688	2	Berkembang	2,766	2	Berkembang
9	Kabupaten Maros	3,260	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	3,200	3	Terdefinisi	3,000	3	Terdefinisi
10	Kabupaten Sinjai	3,270	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	3,040	3	Terdefinisi	2,820	2	Berkembang
11	Kabupaten Soppeng	3,100	3	Terdefinisi	2,14	2	Structured	2,930	2	Berkembang	2,620	2	Berkembang
12	Kabupaten Takalar	2,819	2	Berkembang	1,21	1	Initial	2,500	2	Berkembang	2,354	2	Berkembang
13	Kabupaten Wajo	3,001	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,725	2	Berkembang	2,910	2	Berkembang
14	Kota Makassar	3,281	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	3,113	3	Terdefinisi	2,490	2	Berkembang
15	Kota Parepare	3,353	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	3,063	3	Terdefinisi	2,928	2	Berkembang
16	Kabupaten Barru	2,967	2	Berkembang	2,38	2	Structured	2,750	2	Berkembang	2,508	2	Berkembang
17	Kabupaten Bone	3,086	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,800	2	Berkembang	2,532	2	Berkembang
18	Kabupaten Enrekang	2,918	2	Berkembang	3,00	3	Delivered	2,650	2	Berkembang	2,462	2	Berkembang
19	Kabupaten Luwu Timur	3,031	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,906	2	Berkembang	2,910	2	Berkembang
20	Kabupaten Luwu Utara	3,222	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,765	2	Berkembang	2,264	2	Berkembang
21	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	2,828	2	Berkembang	2,30	2	Structured	2,725	2	Berkembang	2,910	2	Berkembang
22	Kabupaten Pinrang	3,187	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,950	2	Berkembang	2,628	2	Berkembang
23	Kabupaten Sidrap	3,188	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,838	2	Berkembang	2,406	2	Berkembang
24	Kabupaten Tana Toraja	2,206	2	Berkembang	2,43	1	Initial	1,800	1	Rintisan	1,500	1	Rintisan
25	Kabupaten Toraja Utara	2,864	2	Berkembang	1,00	2	Structured	2,520	2	Berkembang	2,430	2	Berkembang

